

CARA PENYEDIA TAYANG KATALOG LOKAL DAN

CARA PP & PPK MEMBELI DI KATALOG LOKAL

Webinar Mudjisantosa Training and Consulting, 04 Maret 2023

Christian Gamas, S.T., S.H., M.M., AFP., Cp.NLP., CLMA., C.RM., C.Med., CPOf., CPSp



**CHRISTIAN GAMAS,
S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,CP.NLP.,CLMA.,CRM.,CSCM.,C.M
ED.,CPOF**

- ▶ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
- ▶ Kantor : LPSE Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kutai Barat
- ▶ •Email : christian.gamas.mac@gmail.com
- ▶ •Blog : <https://christiangamas.net/>
- ▶ •Whatasapp : 081330302605
- ▶ •Youtube : <https://www.youtube.com/christiangamas>



CHRISTIAN GAMAS, S.T.,S.H.,M.M.,AFP.,CP.NLP.,CLMA.,CRM.,CSCM.,C.M ED.,CPOF., CPSP

- ▶ Sub-Koordinator Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Kutai Barat
- ▶ Berpengalaman sebagai PPK, Pokmiil, PP, PjPHP/PPHP, dan PPTK
- ▶ Fasilitator Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP (Level 1 s/d Level 3)
- ▶ Probitiy Advisor LKPP
- ▶ Mediator bersertifikat Lembaga Terakreditasi MA/BNSP
- ▶ Trainer bersertifikat BNSP
- ▶ Manajer Supply Chain Management bersertifikat BNSP
- ▶ Praktisi Pengadaan bersertifikat BNSP
- ▶ Praktisi Pengadaan Pemerintah bersertifikat LKPP

Pak C / Mr. C



Pak C / Mr. C

Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Ahli
Muda

similarweb

christiangamas.net VS. Add to compare

September 2022 | All traffic

christiangamas.net

blog pengadaan barang/jasa pemerintah- catatan - senarai ringkas - tulisan singkat - pendapat - serba serbi - suplementasi kuliah / Show more

Company home - optimalisasi pemerintahan demi memajukan bangsa

Year Founded --

Employees 11 - 50

HQ --

Annual Revenue --

Industry Law and Government > Government

Global Rank #1,776,013 +237,658

Country Rank #64,244 +8,605 Indonesia

Category Rank #791 +41 Law and Government > Government (In Indonesia)

Connect this website

Total Visits 23.8K

Bounce Rate 51.97%

Pages per Visit 1.59

Avg Visit Duration 00:00:23

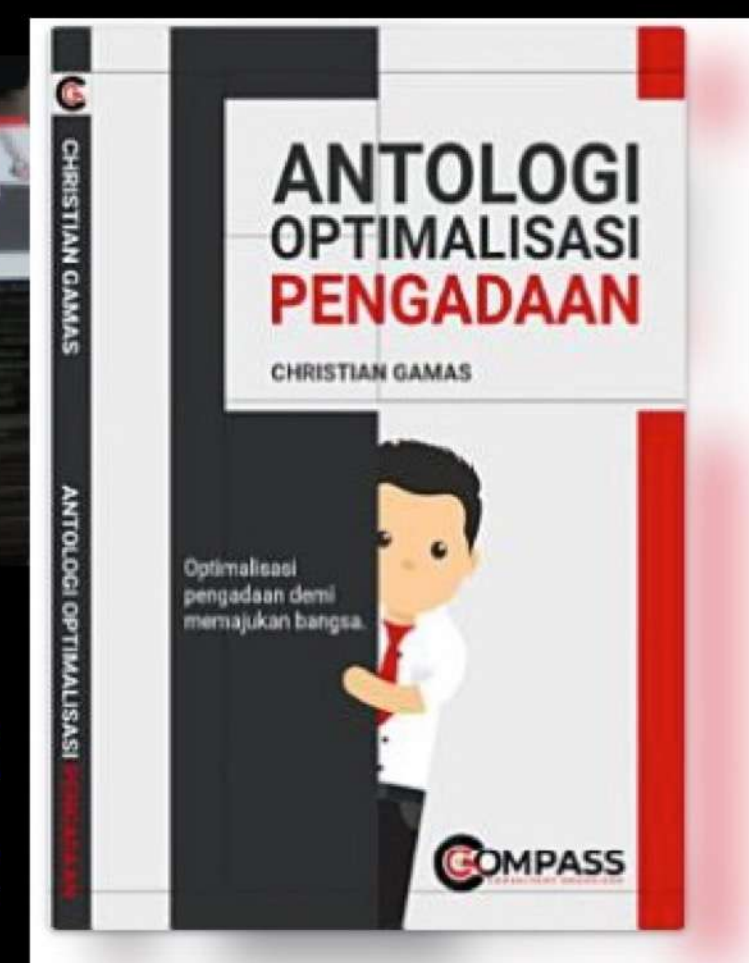
Blogger PBJP
christiangamas.net

Youtuber PBJP

<https://www.youtube.com/christiangamas>



Christian Gamas, S.T., S.H., M.M., AFP., Cp.NLP, CLMA, C.RM., CSCM., C.Med., CPOf



**Penulis Buku Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah**





TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Peserta dalam konteks “Katalog Elektronik Lokal” mengetahui “Cara Penyedia Menayangkan Produk” dan “Cara melaksanakan Pemilihan Penyedia”

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

1. Mengetahui Serba Serbi Katalog Elektronik Pengadaan Pemerintah
2. Proses Penayangan Produk dalam Katalog Elektronik
3. Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Pemilihan “E-Purchasing” menggunakan Katalog Elektronik

KATALOG PENGADAAN PEMERINTAH



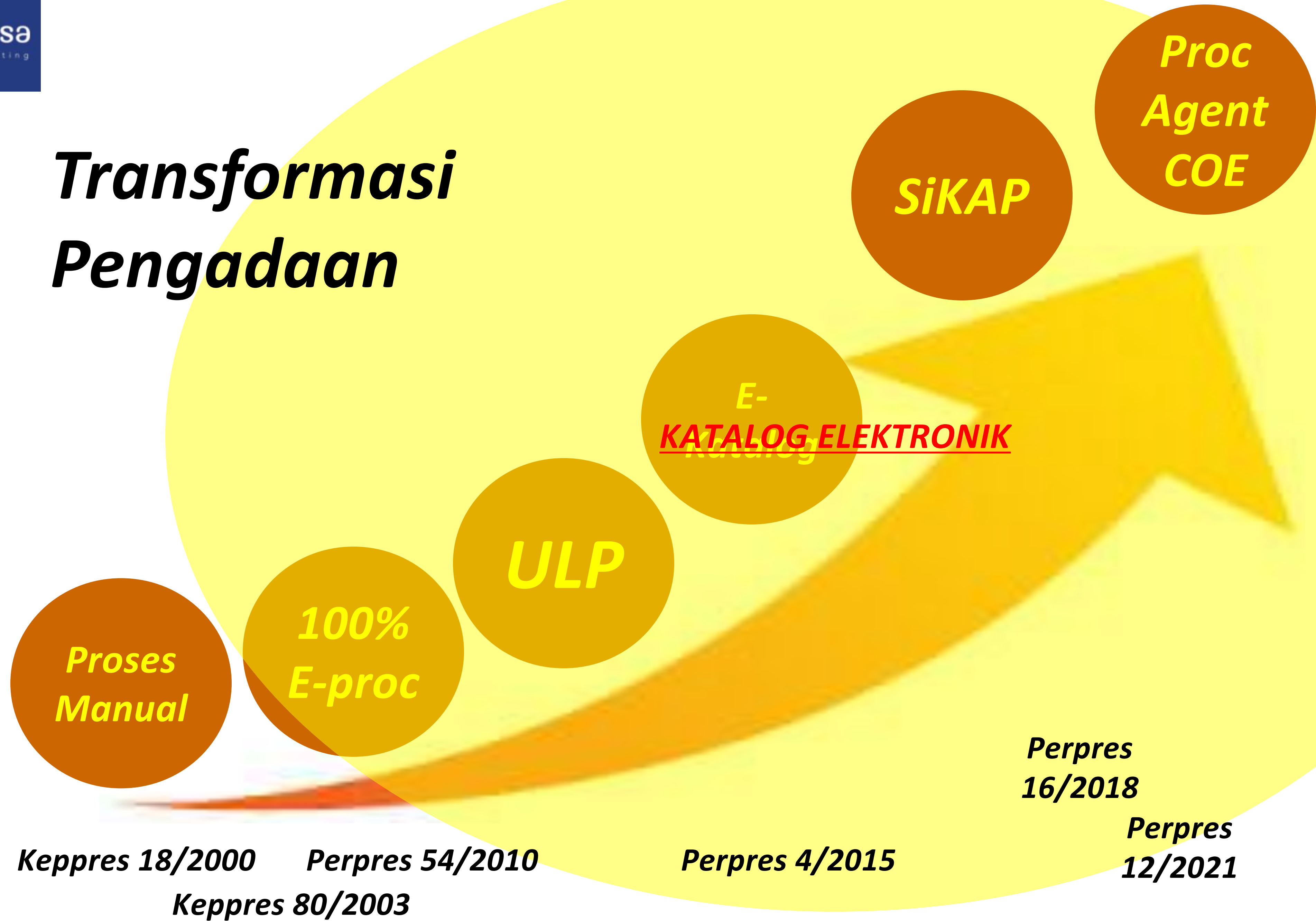
- 01 Mengetahui Serba Serbi Katalog Elektronik Pengadaan Pemerintah
- 02 Proses Penayangan Produk dalam Katalog Elektronik
- 03 Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Pemilihan “E-Purchasing” menggunakan Katalog Elektronik

KATALOG PENGADAAN PEMERINTAH



- 01 Mengetahui Serba Serbi Katalog Elektronik Pengadaan Pemerintah
- 02 Proses Penayangan Produk dalam Katalog Elektronik
- 03 Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Pemilihan “E-Purchasing” menggunakan Katalog Elektronik

Transformasi Pengadaan



Keppres 18/2000

Keppres 80/2003

Perpres 54/2010

Perpres 4/2015

Perpres
16/2018

Perpres
12/2021

VALUE FOR MONEY

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

Dasar Penyelenggaraan **Katalog Elektronik**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021

Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik

Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022

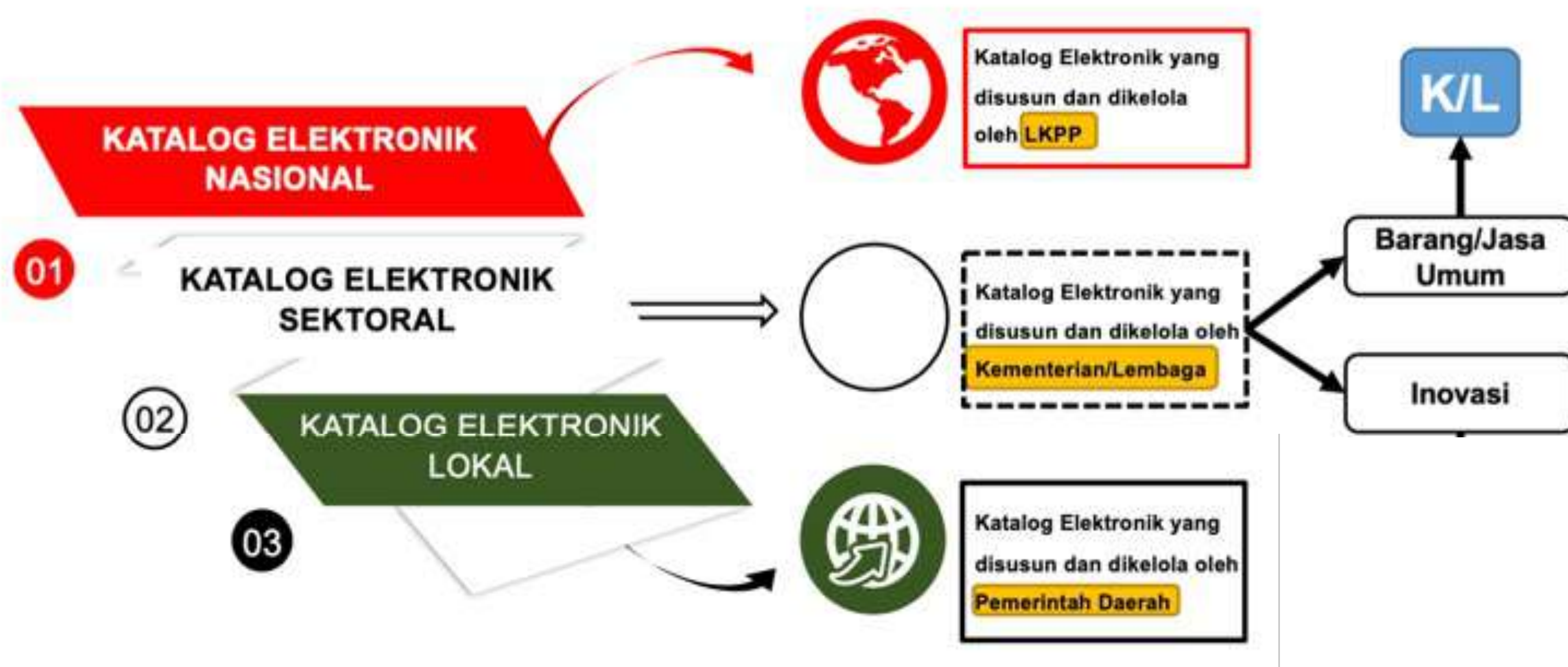
Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik



sumber : jdih.lkpp.go.id

Pak C / Mr. C

Jenis dan Pengertian Katalog Elektronik



DEFINISI

Katalog Elektronik adalah sistem informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

METODE PEMILIHAN PBJP

	BARANG	PEK. KONSTRUKSI	JASA LAINNYA	KONSULTANSI
Melalui e-katalog/toko daring	E PURCHASING			-
max. 200jt	PENGADAAN LANGSUNG			PENGADAAN LANGSUNG
Keadaan tertentu & khusus	PENUNJUKAN LANGSUNG			
> 200 jt	TENDER CEPAT (Spek & Vol. terperinci) Pelaku terqualifikasi dalam SIKaP			-
	TENDER (pilihan terakhir)			SELEKSI

max. 100jt

> 100jt

Pembelian Secara Elektronik (E-purchasing)

Katalog
Elektronik

Toko Daring

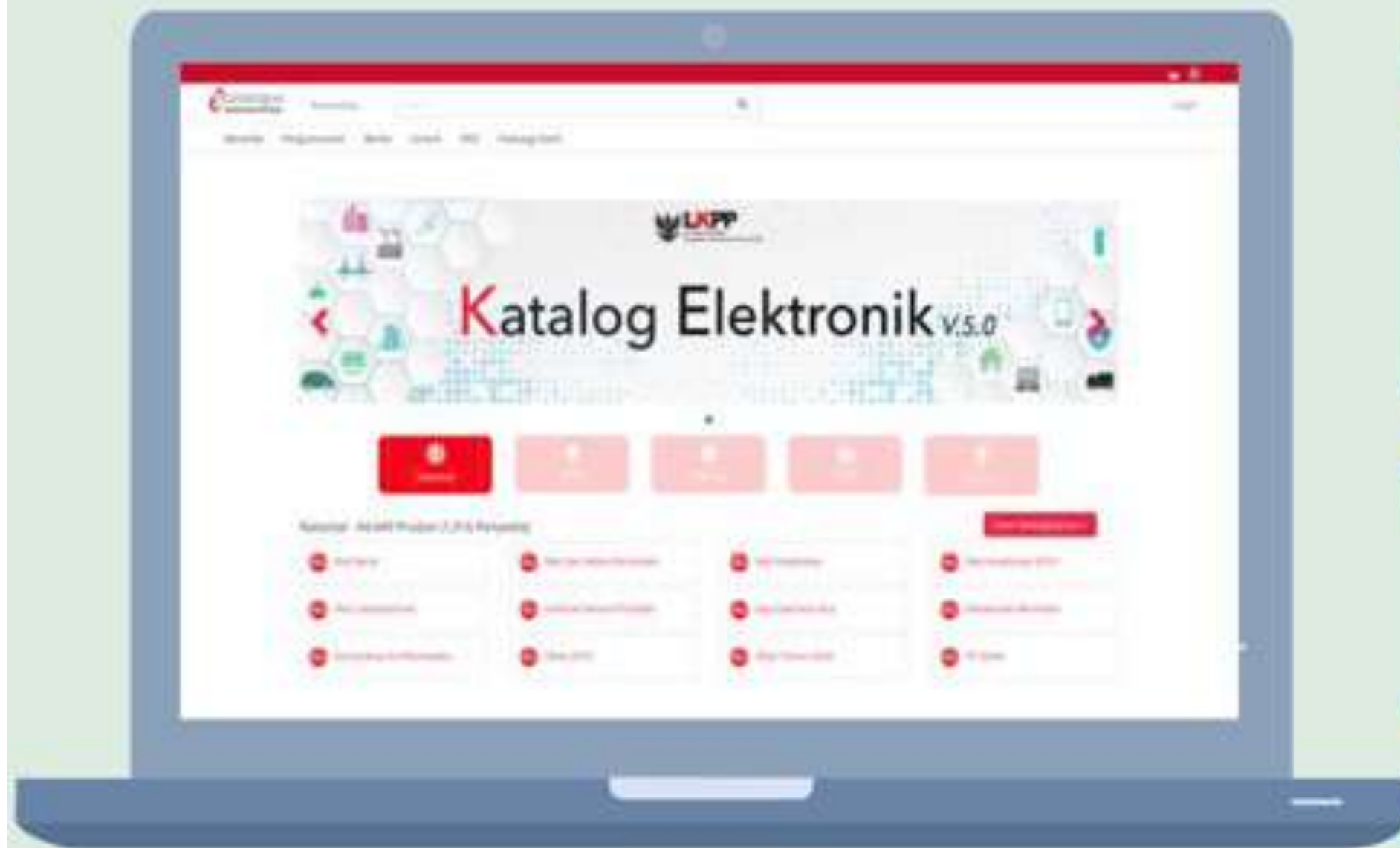
- **E-purchasing** adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem **katalog elektronik** dan **toko daring**
- tidak diperlukan jaminan penawaran & jaminan pelaksanaan

*Pasal 1 angka 35 Perpres 12/2021
*Pasal 38 ayat (2) Perpres 12/2021



- wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau **strategis** yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
- Bentuk kontrak berupa **Surat Pesanan**

MANFAAT KATALOG ELEKTRONIK LOKAL



Menggerakkan dan menyejahterakan ekonomi lokal lewat optimalisasi pelibatan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemda.

Memudahkan mekanisme belanja Pemda untuk mempercepat realisasi anggaran dengan tetap mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.

Belanja barang/jasa tercatat secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel.

KATALOG PENGADAAN PEMERINTAH



- 01 Mengetahui Serba Serbi Katalog Elektronik Pengadaan Pemerintah
- 02 Proses Penayangan Produk dalam Katalog Elektronik
- 03 Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Pemilihan “E-Purchasing” menggunakan Katalog Elektronik

PENGADAAN DIDORONG AGAR EFISIEN!



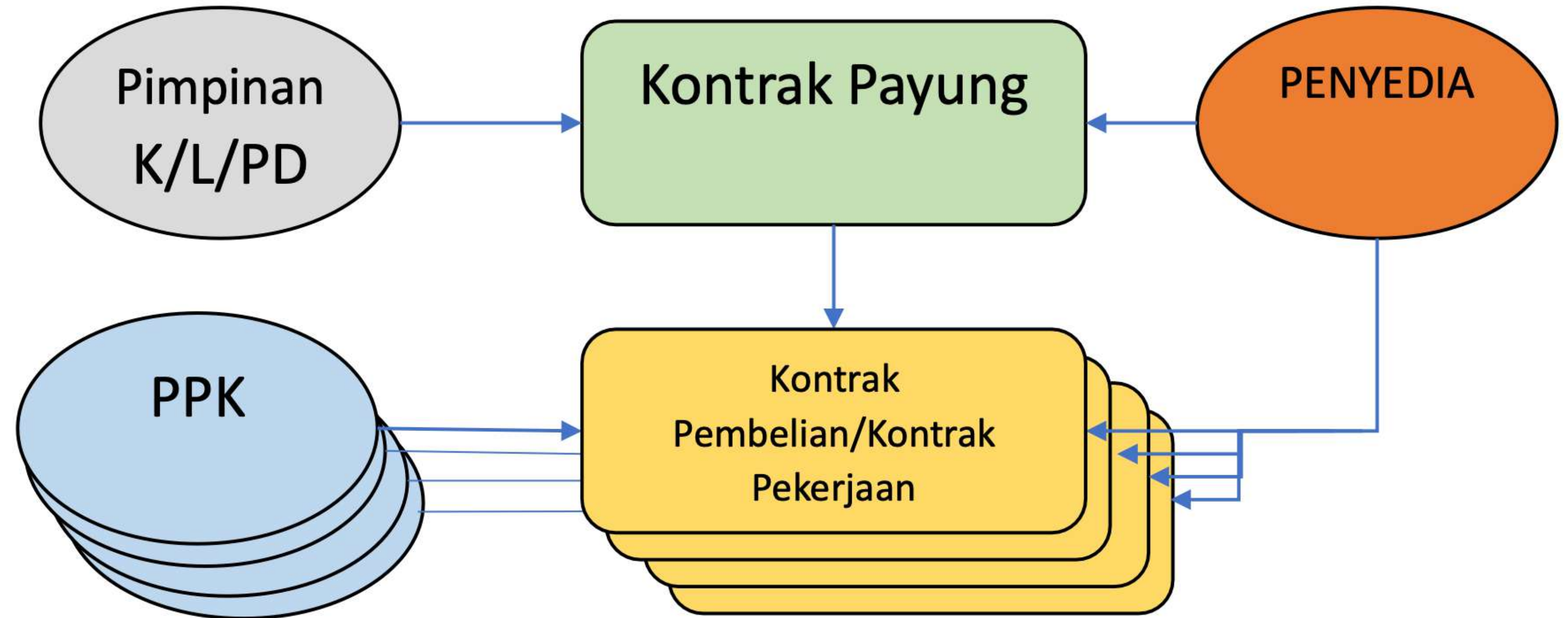
TIDAK SEMUA HAL HARUS TENDER

- Meningkatkan efisiensi bila menggunakan Tender/Seleksi
- Mengurangi biaya bila menggunakan Tender/Seleksi

KATALOG ELEKTRONIK ADALAH VARIASI KONTRAK PAYUNG

Inovasi kontrak

Berikut skema pelaksanaan Kontrak Payung, sesuai gambar 11.



Sumber : JDIH LKPP

Pak C / Mr. C

RELAKSASI PENAYANGAN KATALOG UNTUK PRODUK ROUTINE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 72

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.
- (4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
 - a. Tender; atau
 - b. Negosiasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.



- (4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
 - a. Tender; atau
 - b. Negosiasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

29. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 72 diubah, serta ayat (4) Pasal 72 dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Pak C / Mr. C

RELAKSASI PENAYANGAN KATALOG UNTUK PRODUK ROUTINE



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 72

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.
- (4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
 - a. Tender; atau
 - b. Negosiasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.



- (4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
 - a. Tender; atau
 - b. Negosiasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

29. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 72 diubah, serta ayat (4) Pasal 72 dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan elektronik diatur deng

➤ Walau Pasal 72 ayat (4) "dihapus" di Perpres 12/2021, proses Pra Katalog masih dapat dilakukan

Pak C / Mr. C

KONSOLIDASI DENGAN KONTRAK PAYUNG PADA KATALOG

➤ Walau Pasal 72 ayat (4) "dihapus" di Perpres 12/2021, proses Pra Katalog masih dapat dilakukan



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UNTUK KATALOG ELEKTRONIK

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, perlu menyusun ketentuan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

jdih.lkpp.go.id

- 2 -

- Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.
- KEDUA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan strategi untuk mengoptimisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk katalog elektronik.
- KETIGA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik dilaksanakan oleh:

jdih.lkpp.go.id

- 3 -

- a. Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi/membina sektor terkait;
- b. Gubernur/Walikota/Bupati; atau
- c. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a dan huruf b dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.

KELIMA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf c dapat dibantu oleh unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Dalam hal dibutuhkan percepatan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, pelaksanaan konsolidasi dimaksud dapat dilakukan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkoordinasi dengan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, antara lain meliputi:

jdih.lkpp.go.id

Pak C / Mr. C

KONSOLIDASI DENGAN KONTRAK PAYUNG PADA KATALOG



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UNTUK KATALOG ELEKTRONIK

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, perlu menyusun ketentuan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

jdih.lkpp.go.id

- 2 -

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.

KEDUA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan strategi untuk mengoptimisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk katalog elektronik.

KETIGA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik dilaksanakan oleh:

jdih.lkpp.go.id

- 3 -

a. Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi/membina sektor terkait;
b. Gubernur/Walikota/Bupati; atau
c. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a dan huruf b dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.

KELIMA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf c dapat dibantu oleh unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Dalam hal dibutuhkan percepatan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, pelaksanaan konsolidasi dimaksud dapat dilakukan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkoordinasi dengan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, antara lain meliputi:

jdih.lkpp.go.id

Pak C / Mr. C

KONSOLIDASI DENGAN KONTRAK PAYUNG PADA KATALOG

- 4 -

- a. penetapan tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
- b. penetapan tim pelaksana konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- c. pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Nasional untuk katalog elektronik;
- d. penandatanganan kontrak payung konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
- e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik; dan
- f. pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.

KEDELAPAN : Tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH huruf a, antara lain meliputi:

- a. analisis kebutuhan barang/jasa yang akan dikonsolidasikan;
- b. analisis pasar;
- c. persiapan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - 1) penyusunan dan penetapan spesifikasi;
 - 2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri (jika diperlukan); dan
 - 3) penetapan rancangan Kontrak Payung;
- d. pelaksanaan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - 1) penetapan cara pelaksanaan pemilihan berupa:
 - a) Tender; dan/atau
 - b) Negosiasi.
 - 2) penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
 - 3) pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- e. penandatanganan Kontrak Payung; dan

jdih.lkpp.go.id

- 5 -

- f. pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik.

KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH huruf a, ditetapkan oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESEPULUH : Hasil pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, antara lain meliputi:

- a. penetapan pemenang konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, yang dapat terdiri atas 1 (satu) pemenang atau lebih dari 1 (satu) pemenang;
- b. penetapan harga konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat berupa antara lain:
 - 1) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat dinegosiasikan saat *E-purchasing*.
 - 2) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat tidak dapat dinegosiasikan (harga tetap) saat *E-purchasing*.
 - 3) Harga khusus bagi pemerintah dari masing-masing pemenang.

KESEBELAS : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa dapat memberikan pendampingan dalam pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 220 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.lkpp.go.id

- 6 -

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



jdih.lkpp.go.id

Pak C / Mr. C

KONSOLIDASI DENGAN KONTRAK PAYUNG PADA KATALOG

- 4 -

- a. penetapan tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
- b. penetapan tim pelaksana konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- c. pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Nasional untuk katalog elektronik;
- d. penandatanganan kontrak payung konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
- e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik; dan
- f. pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.

KEDELAPAN : Tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH huruf a, antara lain meliputi:

- a. analisis kebutuhan barang/jasa yang akan dikonsolidasikan;
- b. analisis pasar;
- c. persiapan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - 1) penyusunan dan penetapan spesifikasi;
 - 2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri (jika diperlukan); dan
 - 3) penetapan rancangan Kontrak Payung;
- d. pelaksanaan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - 1) penetapan cara pelaksanaan pemilihan berupa:
 - a) Tender; dan/atau
 - b) Negosiasi.
 - 2) penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
 - 3) pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- e. penandatanganan Kontrak Payung; dan

jdih.lkpp.go.id

- 5 -

- f. pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik.

KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH huruf a, ditetapkan oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESEPULUH : Hasil pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, antara lain meliputi:

- a. penetapan pemenang konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, yang dapat terdiri atas 1 (satu) pemenang atau lebih dari 1 (satu) pemenang;
- b. penetapan harga konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat berupa antara lain:
 - 1) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat dinegosiasikan saat *E-purchasing*.
 - 2) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat tidak dapat dinegosiasikan (harga tetap) saat *E-purchasing*.
 - 3) Harga khusus bagi pemerintah dari masing-masing pemenang.

KESEBELAS : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa dapat memberikan pendampingan dalam pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.

➤ Walau Pasal 72 ayat (4) "dihapus" di Perpres 12/2021, proses Pra Katalog masih dapat dilakukan

jdih.lkpp.go.id

- 6 -

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



jdih.lkpp.go.id

Pak C / Mr. C



TINGGI

Risiko
pengadaan

RENDAH

3. Nilai pengadaannya relatif rendah dan risikonya barang/jasa akan sulit untuk diperoleh

"Bottleneck Items"

4. Nilai pengadaannya relatif tinggi dan risikonya barang/jasa akan sulit untuk diperoleh

"Strategic Products"

1. Nilai pengadaannya relatif rendah dan risikonya barang/jasa akan mudah untuk diperoleh

"Routine Products"

2. Nilai pengadaannya relatif tinggi dan risikonya barang/jasa akan mudah untuk diperoleh

"Leverage Products"

RENDAH

Nilai Pengadaan

TINGGI



Kelompok *Routine*

Adalah kelompok barang/jasa yang nilai pengadaan per tahunnya RENDAH bila dibandingkan dengan total nilai pengadaan. Jika barang/jasa tersebut tidak ada tepat pada waktunya, maka risiko/dampak terhadap penurunan kinerjanya RENDAH. Barang/Jasa kelompok ini sifatnya umum, spesifikasi standar, mudah diperoleh, penyediannya banyak, dan daya tarik penyedia biasanya RENDAH. Contoh alat tulis kantor.



Kelompok *Leverage*

Adalah kelompok barang/jasa yang nilai pengadaan per tahunnya dibandingkan total nilai pengadaan adalah **TINGGI** dan risiko/dampak terhadap penurunan kinerja jika barang/jasa tersebut tidak tepat pada waktunya **RENDAH**. Barang/Jasa kelompok ini sifatnya umum, spesifikasi standar, mudah diperoleh, penyediannya banyak, daya tarik penyediannya biasanya **TINGGI**. Walaupun nilainya tinggi, bukan menjadi prioritas dan dapat ditangguhkan pengadaannya manakala terdapat prioritas yang lebih penting. Contoh: pengadaan komputer untuk 600 orang pegawai



Kelompok *Bottleneck*

Adalah kelompok barang/jasa yang nilai pengadaan per tahunnya dibandingkan total nilai pengadaan adalah RENDAH dan risiko/dampak terhadap penurunan kinerja jika barang/jasa tersebut tidak ada tepat pada waktunya TINGGI. Barang/Jasa kelompok ini sifatnya khusus, spesifikasi umumnya tidak standar, barang/jasanya tidak mudah diperoleh, penyediaanya sedikit, barang/jasa kelompok ini biasanya dilakukan oleh penyedia-penyedia yang mengkhususkan diri dibidang tertentu, sehingga daya tarik penyedia biasanya TINGGI. Pengadaan pada tipe ini, walaupun nilai rendah, akan menjadi prioritas utama untuk

dilakukan pengadaan, manakala barang/jasa tersebut dibutuhkan. Contoh: suku cadang yang hanya tersedia dari satu pelaku usaha karena terkait hak paten.

Contoh :

Spare Part Lift Pasien pada Rumah Sakit dengan 25 lantai



Kelompok *Critical*

Adalah kelompok Barang/Jasa yang nilai pengadaan pertahunnya dibandingkan total nilai pengadaan adalah TINGGI dan risiko/dampak terhadap penurunan kinerja jika barang/jasa tersebut tidak ada tepat pada waktunya TINGGI. Barang/jasa kelompok ini biasanya dilakukan oleh penyedia-penyedia yang mengkhususkan diri dibidang tertentu sehingga daya tarik penyedia biasanya TINGGI. Jika barang/jasa kelompok ini tidak tersedia pada waktunya, akan berdampak drastis pada penurunan kinerja atau dapat membuat kegiatan terhenti. Penyedia kelompok barang/jasa ini merupakan perusahaan atau profesional yang memiliki kompetensi dan spesialisasi khusus, sehingga memiliki nilai paling tinggi dalam rantai pengadaan barang/jasa, seperti pabrikan, distributor atau agen tunggal. Pada umumnya barang/jasa yang disediakan merupakan bisnis utama penyedia. Pengadaan pada tipe ini, cenderung menjadi prioritas utama, bukan karena nilainya yang besar dan berpengaruh besar terhadap serapan anggaran, namun lebih kepada tingkat risiko dan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut, yang menuntut untuk harus dijadikan prioritas utama. Contoh: pengadaan seismograph (penambahan titik-titik pengamatan baru) pada sistem peringatan dini tsunami, pengadaan radar cuaca untuk menunjang keselamatan transportasi bandar udara.



Analisa Pasar

Penyedia	Posisi Kuadran Kraljic	Strategi Pengadaan Pembeli (Pemerintah)	Perilaku Penyedia yang sesuai	Posisi Pemasok dalam Pasar	Hal yang disukai	Metode Evaluasi
Responsif (Respond)	Barang/Jasa berstatus “Leverage”	Mengidentifikasi dan memanfaatkan pasar	Secara rasional apabila penawaran masih masuk akal, bersedia mengurangi harga/biaya	Merespon pekerjaan dalam jangka pendek maupun Panjang	Kepastian	Tender /Tender Cepat: Harga Terendah Seleksi : Biaya terendah
Dapat diandalkan (Reliable)	Barang/Jasa berstatus “Routine”	Melakukan persiapan pengadaan yang terkelola dengan baik dan memiliki kejelasan dalam pelaksanaan	Penyedia merasa cocok dengan ketentuan pengadaan	Merespon pekerjaan jangka pendek, namun diikuti dengan stabilitas	Kestabilan	Tender : • Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis • Harga Terendah Seleksi : • Pagu Anggaran • Biaya terendah
Inovatif (Innovative)	Barang/Jasa berstatus “Bottleneck”	Berorientasi untuk mengamankan pasokan dan mencoba mendorong adanya potensi / alternatif lain	Dalam kondisi pasar yang monopoli biasanya pasif, Tapi dalam kondisi sebagai <i>“startup”</i> berusaha Proaktif dengan inovasi	Biasanya cenderung berusaha menjadi Market Leader bahkan cenderung monopoli	High Risk High Return dengan adanya emphasis pada <i>R & D</i>	Tender : • Sistem Nilai Seleksi : • Kualitas dan Biaya • Kualitas
Saling Pengertian (Empathetic)	Barang / Jasa Berstatus “Critical”	Menekankan sejak semula bahwa dalam jangka Panjang Kerjasama secara kolaboratif menjadi prioritas	Proaktif dan cenderung Solutif	Merespon Pekerjaan jangka menengah hingga jangka Panjang / tahun jamak	Kejelasan Kontraktual untuk menghadapi ketidakpastian, diikuti dengan kinerja jangka panjang	Tender : • Sistem Nilai • Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis Seleksi : • Kualitas dan Biaya • Kualitas

BAGAIMANA AGAR EFISIEN?



Gambar 4.1 Matrix Kraljic Box

Dikutip dari : Modul Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Muda
Jenis Kompetensi 1 Level 3 PPSDM LKPP

MATRIKS RESPON ATAS SPM / KRALJIC BOX

Analisa Pak C

Aspek	Bottleneck	Strategic	Routine	Leverage
Jumlah Pelaku Usaha	Spesialis, mungkin monopoli/oligopoly	Sedikit / beberapa	Banyak	Banyak dan kompetitif
Kekuatan / Power yang dominan	Pemasok	Saling ketergantungan	Masing-masing independent	Pembeli
Alternatif	Sedikit namun ada alternatif	Sedikit dan mungkin tidak ada alternatif	Banyak alternatif	Banyak alternatif
Harga atas disrupsi	Tinggi	Menengah hingga tinggi	Rendah	Rendah hingga menengah
Relasi / Hubungan	Jangka Panjang dengan Kontrak	Jangka Panjang dengan kemitraan dan kolaborasi	Pendek	Pendek, namun memungkinkan pemusatan kekuatan pembelian
Kriteria kebutuhan	Memerlukan keamanan dan kepastian sebelum dapat mencari alternatif	Memerlukan keamanan dan keberlangsungan dari pasokan	Perlu penyederhanaan dan memperbanyak variasi proses pasokan	Perlu pasokan yang memerlukan biaya pengadaan rendah

Excellence in Public Sector Procurement – How to control costs and add value (Stuart Emmett & Paul Wright, 2011 – ISBN 1-903-499-66-6)

BAGAIMANA AGAR EFISIEN?



Gambar 4.1 Matrix Kraljic Box

Dikutip dari : Modul Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Muda
Jenis Kompetensi 1 Level 3 PPSDM LKPP

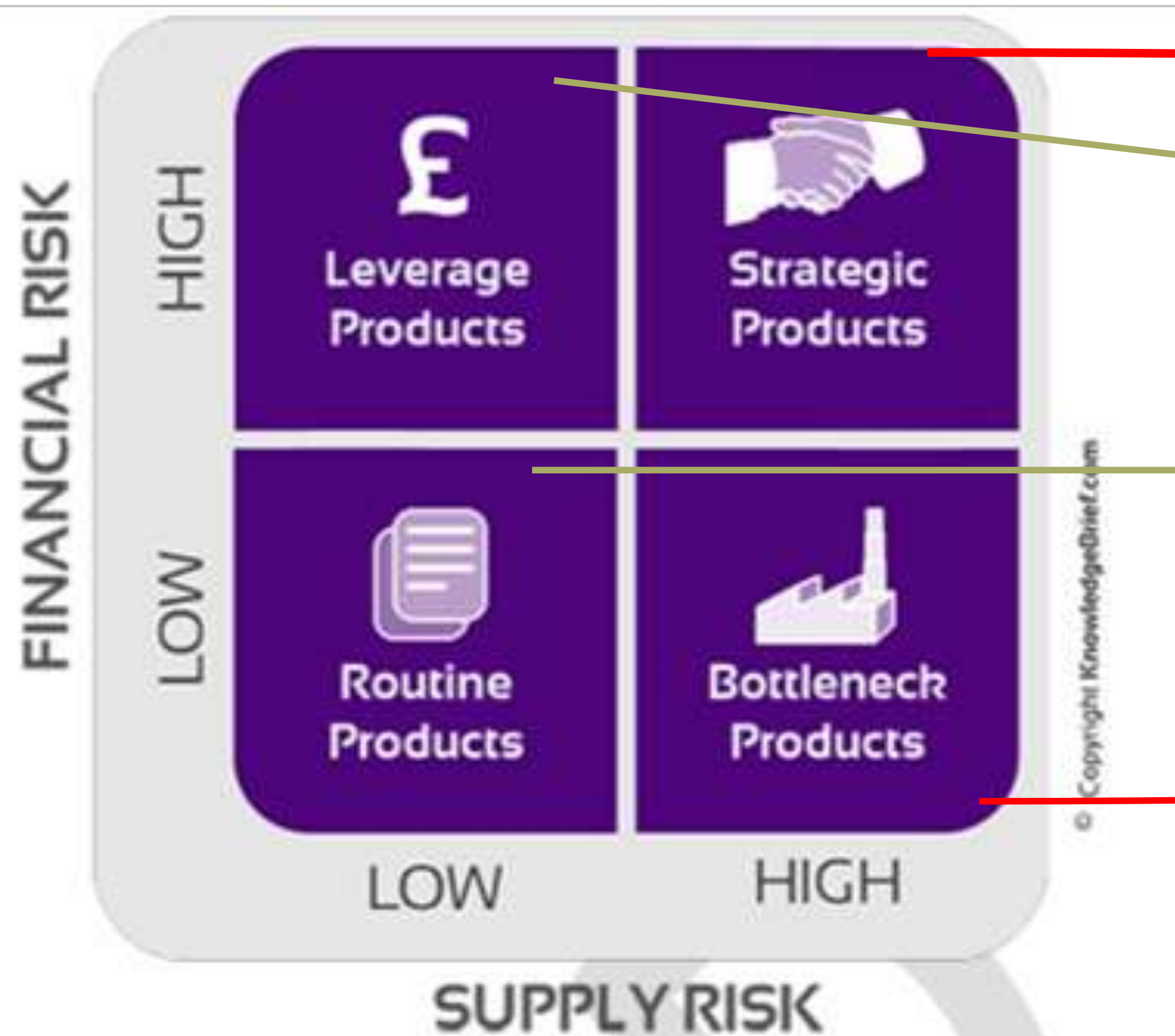
MATRIKS RESPON ATAS SPM / KRALJIC BOX (2)

Analisa Pak C

Aspek	Bottleneck	Strategic	Routine	Leverage
Pelaku Pengadaan	Memerlukan pengetahuan pasar yang tinggi dan mampu membuat rencana cadangan	Memerlukan kemampuan dalam proses pengadaan, implementasi, dan monitoring yang tinggi	Kemampuan Pengadaan dasar saja	Kemampuan Pengadaan level menengah
Metode Sourcing	RFI/RFQ (Umum) Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/PBJ Khusus Misal Metode Penyeragaman 2 file (Pemerintah)	Kuisisioner komprehensif dan analisis mendalam dengan kontrak yang membagi risiko dan tanggung jawab secara detil (Umum) Tender /Seleksi/Pengadaan Langsung yang menyertakan dialog kompetitif Misal Metode penyeragaman 2 tahap (Pemerintah)	RFI/RFQ (Umum) Tender/Tender Cepat/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dengan metode penyeragaman 1 file (pemerintah)	Tender/Tender/Cepat dengan <i>Reverse Auction</i> E-Purchasing
Tingkat Layanan	Memerlukan respon cepat	Bisa menggunakan kontrak payUng dengan system call offs	Spot buying	Surat Pemesanan Standar

Excellence in Public Sector Procurement – How to control costs and add value (Stuart Emmett & Paul Wright, 2011 – ISBN 1-903-499-66-6)

BAGAIMANA AGAR EFISIEN?



Gambar 4.1 Matrix Kraljic Box

Dikutip dari : Modul Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Muda
Jenis Kompetensi 1 Level 3 PPSDM LKPP

MATRIKS RESPON TIPE KATALOG ATAS SPM

Analisa Pak C

Standard dalam Kelola kendalikan kontrak Pembelian, untuk pengelolaan katalog money secukupnya, porsi berimbang dalam membiarkan pasar bekerja namun bisa selektif	Kontrak Payung Untuk kolaborasi keluaran
Standard dalam Kelola kendalikan kontrak Pembelian, untuk Katalog lakukan money secukupnya, porsi besar menyerahkan pada pasar dan penyedia	Kontrak Payung Untuk mengamankan pasokan

Excellence in Public Sector Procurement – How to control costs and add value (Stuart Emmett & Paul Wright, 2011 – ISBN 1-903-499-66-6)

- ▶ Etalase berkategori Produk Strategic : Wajib terapkan SK Kepala LKPP Nomor 121/2023
- ▶ Etalase berkategori Produk Bottleneck : Wajib terapkan SK Kepala LKPP Nomor 121/2023
- ▶ Etalase berkategori Produk Leverage : dapat menerapkan SK Kepala LKPP Nomor 121/2023
- ▶ Etalase berkategori Produk : Pelaku Usaha bebas menampilkan barang/jasa

PROSES JADI PELAKU USAHA PENYEDIA KATALOG



- (4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
- a. Tender, atau
 - b. Negosiasi.

- (1) memuat informasi teknis, TKDN, produk ramah lingkungan, dan lain-lain
- (2) Pengisian data Produk Penyedia, dan informasi lainnya
- (3) Pengelolaan katalog elektronik oleh Kementerian/Lembaga/LKPP.
- (4) Dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai katalog elektronik sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri/LKPP.

Dulu

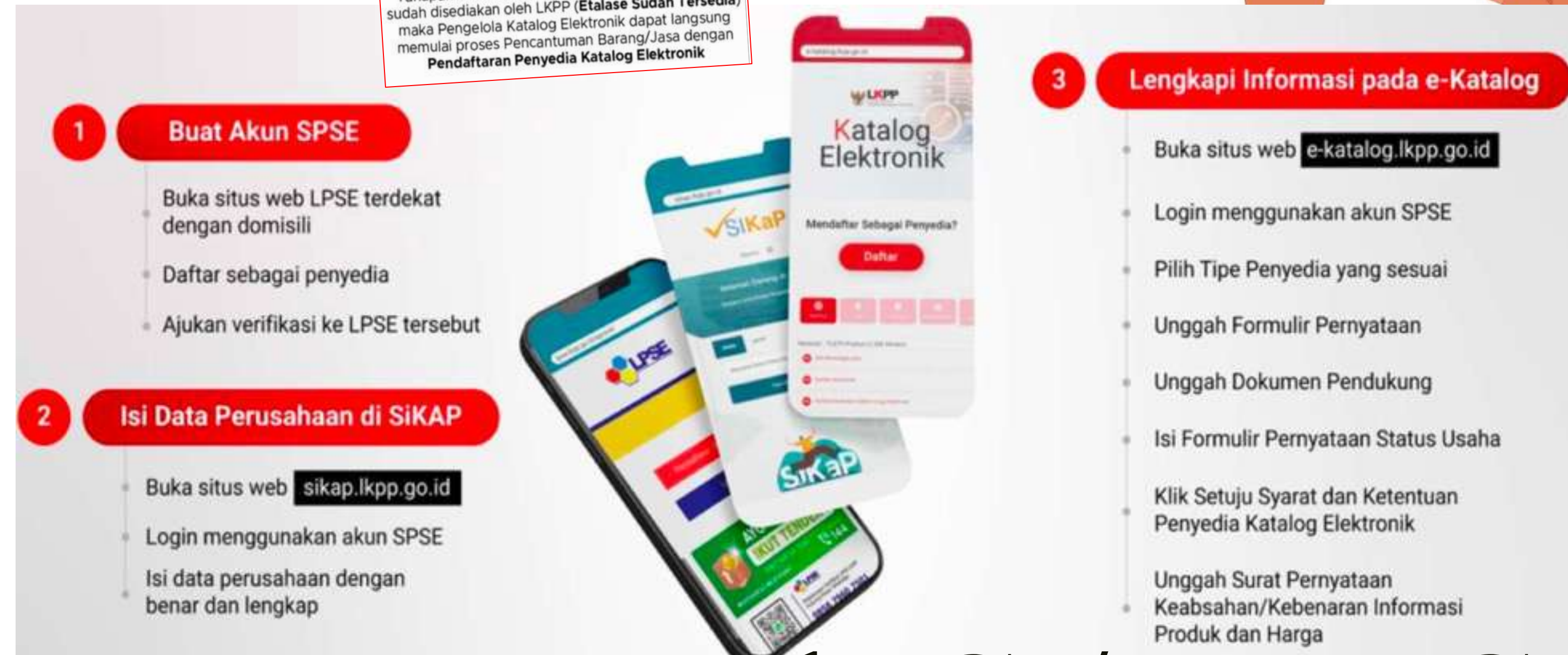
- Pendaftaran
- Pemasukan Dokumen Penawaran
- Verifikasi Administrasi Penyedia
- Verifikasi Produk
- Rekomendasi Ke Pimpinan
- Persetujuan Pimpinan
- Finalisasi Kontrak Katalog
- Penayangan

SIMPLIFIKASI PROSES BISNIS KATALOG ELEKTRONIK

Sekarang

- Pendaftaran
- Penayangan

Tahapan di atas khusus untuk Etalase Produk yang sudah disediakan oleh LKPP (Etalase Sudah Tersedia) maka Pengelola Katalog Elektronik dapat langsung memulai proses Pencantuman Barang/Jasa dengan **Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik**



PROSES JADI PELAKU USAHA PENYEDIA KATALOG



- 1. Menentukan jenis produk/jasa yang akan ditawarkan
- 2. Menentukan lokasi usaha
- 3. Menentukan jenis usaha
- 4. Menentukan jenis produk/jasa yang akan ditawarkan
- 5. Menentukan jenis produk/jasa yang akan ditawarkan
- 6. Menentukan jenis produk/jasa yang akan ditawarkan
- 7. Menentukan jenis produk/jasa yang akan ditawarkan
- 8. Menentukan jenis produk/jasa yang akan ditawarkan
- 9. Menentukan jenis produk/jasa yang akan ditawarkan
- 10. Menentukan jenis produk/jasa yang akan ditawarkan



- 1. Pendaftaran
- 2. Pengisian Data Usaha
- 3. Pengisian Data Produk
- 4. Pengisian Data Kontak
- 5. Pengisian Data Keuangan
- 6. Pengisian Data Lainnya
- 7. Pengisian Data Lainnya
- 8. Pengisian Data Lainnya
- 9. Pengisian Data Lainnya
- 10. Pengisian Data Lainnya

SIMPLIFIKASI PROSES BISNIS KATALOG ELEKTRONIK



- 1. Pendaftaran
- 2. Pengisian Data

Tahapan di atas khusus untuk Etalase Produk yang sudah disediakan oleh LKPP (**Etalase Sudah Tersedia**) maka Pengelola Katalog Elektronik dapat langsung memulai proses Pencantuman Barang/Jasa dengan **Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik**

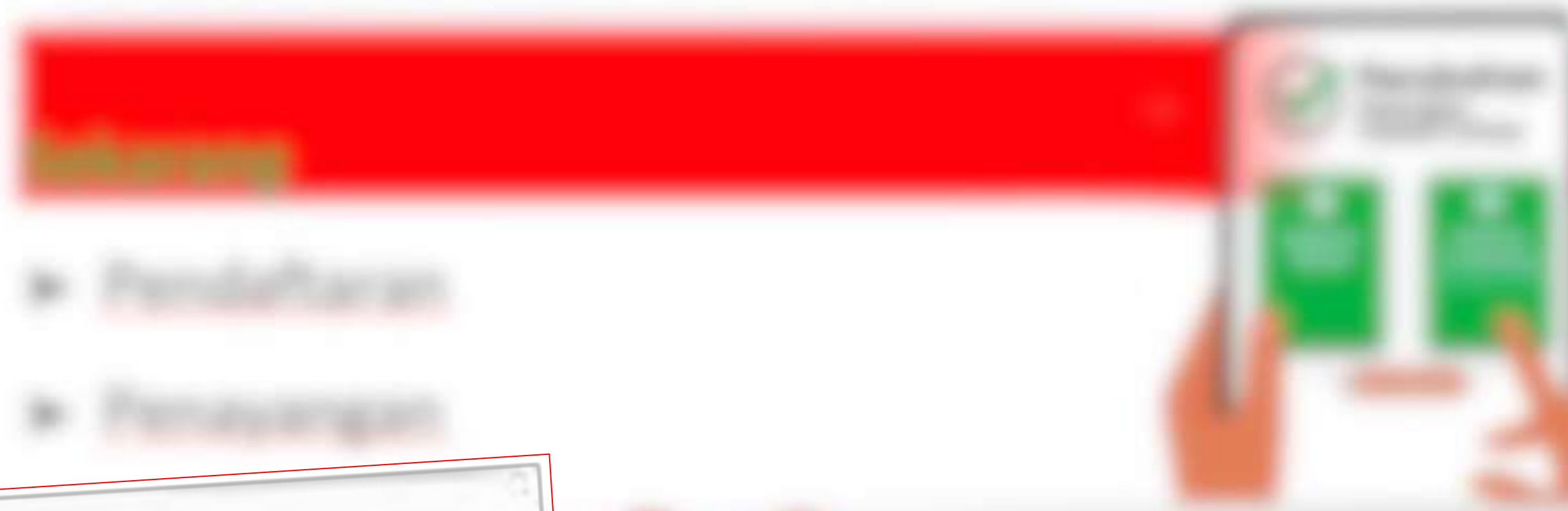


PROSES JADI PELAKU USAHA PENYEDIA KATALOG



- 1. Menentukan jenis produk/jasa yang akan ditawarkan
- 2. Menentukan spesifikasi produk/jasa
- 3. Menentukan harga produk/jasa
- 4. Menentukan lokasi produk/jasa
- 5. Menentukan waktu pengiriman produk/jasa
- 6. Menentukan syarat pembayaran produk/jasa
- 7. Menentukan syarat pengiriman produk/jasa
- 8. Menentukan syarat lainnya

SIMPLIFIKASI PROSES BISNIS KATALOG ELEKTRONIK

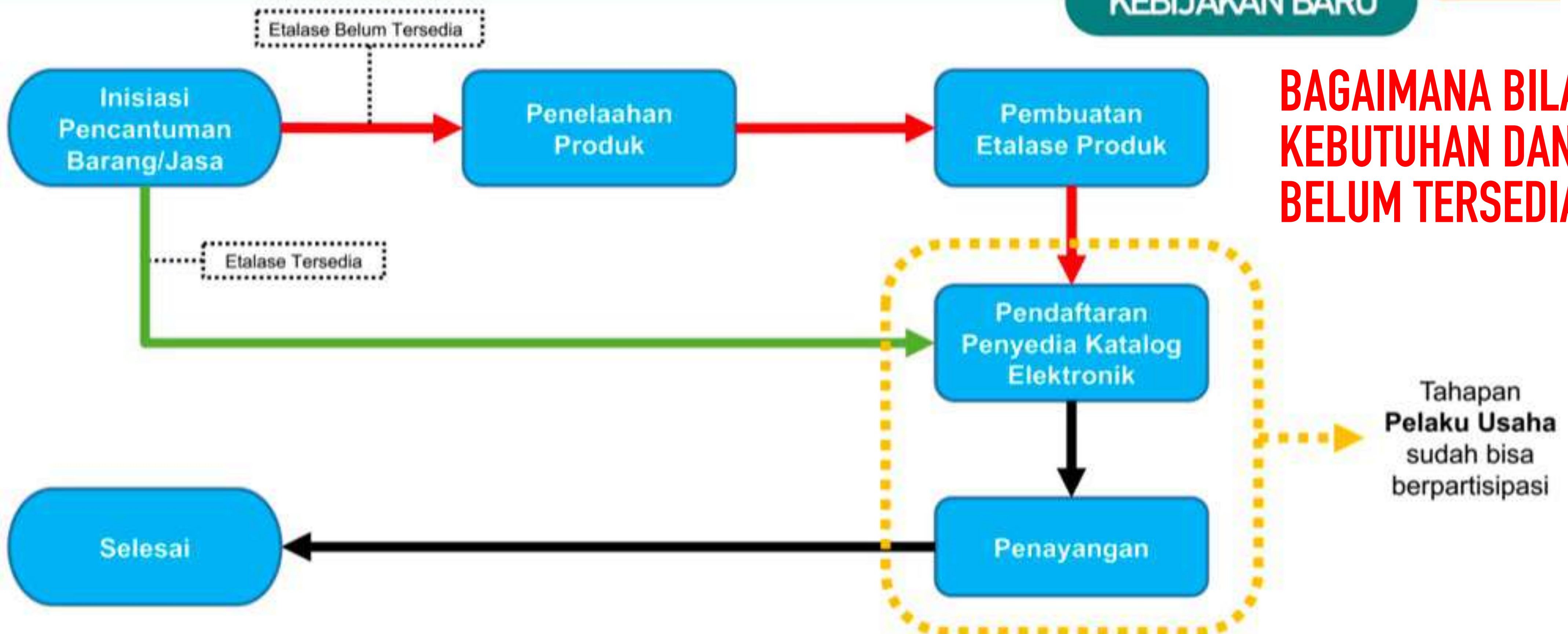


Tahapan di atas khusus untuk Etalase Produk yang sudah disediakan oleh LKPP (**Etalase Sudah Tersedia**) maka Pengelola Katalog Elektronik dapat langsung memulai proses Pencantuman Barang/Jasa dengan **Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik**

BAGAIMANA BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA?

Bagan Alur Proses Pencantuman Produk pada Katalog Elektronik

KEBIJAKAN BARU



**BAGAIMANA BILA ADA
KEBUTUHAN DAN ETALASE
BELUM TERSEDIA?**

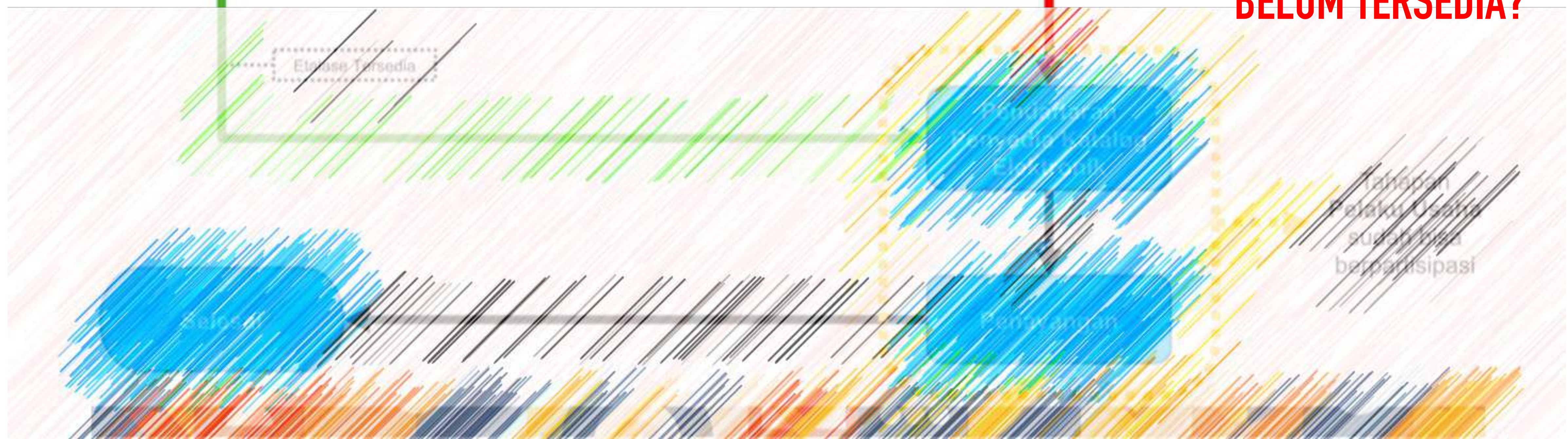
Tahapan
Pelaku Usaha
sudah bisa
berpartisipasi

Bagan Alur Proses Pencantuman Produk pada Katalog Elektronik

KEBIJAKAN BARU



**BAGAIMANA BILA ADA
KEBUTUHAN DAN ETALASE
BELUM TERSEDIA?**



Slide 4 Modul Bahan Ajar LKPP

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Inisiasi Pencantuman B/J

Identifikasi
Barang/Jasa yang
akan dicantumkan
pada Katalog
Elektronik



Ketersediaan Etalase Produk

Kriteria Etalase yang tersedia:

1. Sudah ada Penelaahan Produk
2. Sudah ada Etalase Produk pada laman Pengelola Katalog Elektronik pada Aplikasi Katalog Elektronik

Pendaftaran Penyedia Katalog
Elektronik

Penelaahan Produk

Etalase Tersedia

Etalase Belum Tersedia

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

PENELAHAAN PRODUK

Proses Penelaahan dilakukan apabila hasil pengecekan dinyatakan **tidak tersedia etalase produk** atau dalam rangka **penambahan etalase produk**, Penelaahan dilaksanakan dalam rangka memperoleh/menggali informasi dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Keputusan Hasil Penelaahan Produk ditetapkan oleh :

- ✓ Pejabat Tinggi Madya penerima mandat Menteri/Kepala Lembaga/Badan/Kepala Daerah (Provinsi) atau Pejabat Tinggi Pratama untuk Kepala Daerah Kab/Kota

Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa

Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha, Persyaratan Teknis, dan/atau perizinan barang/jasa (apabila ada)

Kategori Produk beserta Atribut Spesifikasi Teknis

- Kategori Produk → merupakan pengelompokan klasifikasi barang/jasa yang memiliki Atribut yang sama
- Atribut Spesifikasi Teknis → tanda/kelengkapan yang menjadi ciri khas spesifikasi teknis barang/jasa

Telaah produk dalam rangka penambahan kategori produk dapat menggunakan Keputusan Hasil Penelaahan Produk yang telah ada dengan dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan

Think Different, Be Different

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA



PENELAAHAN PRODUK

01

Latar Belakang:

1. Amanat Peraturan Per-UU-an
2. Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
3. Usulan dari Pelaku Usaha
4. Kebutuhan K/L/PD
5. Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi



02

Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa, yaitu:

1. Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik
2. Izin Usaha
3. Pajak
4. Akta Pendirian beserta perubahannya (khusus badan usaha)
5. Status Daftar Hitam
6. Struktur Pembentuk Harga (apabila diperlukan)

03

Rincian penjelasan terkait Etalase Produk yang akan disusun:

1. Kategori Produk
2. Atribut Produk
3. Kelas Harga
4. Tampilan Stok Produk

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

KERANGKA DOKUMEN PENELAAHAN PRODUK

Bab I : Pendahuluan	Bab II : Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik	Bab III : Profil Etalase Produk	Bab IV : Petunjuk Pengisian Atribut Produk
<ul style="list-style-type: none">• Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa• Ringkasan Etalase Produk• Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog)• Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha• Produk yang ditawarkan pada Etalase Produk	<ul style="list-style-type: none">• Kategori Produk dan Sub-Kategori Produk (apabila ada)• Atribut Produk• Kelas Harga Produk• Tampilan Stok Produk• Kebutuhan Ongkos Kirim• Duplikasi Pembelian Produk• Informasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Status Pengisian Atribut Produk (Wajib/Tidak Wajib)• Keterangan yang harus diisi oleh Calon Penyedia terhadap semua Atribut Produk untuk masing-masing Kategori dan Sub-Kategori (apabila ada)

Berdasarkan acuan dari Dokumen Penelaahan Etalase Produk Katalog Elektronik yang disusun oleh LKPP.

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Bab I : Pendahuluan

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

1. Paragraf singkat berisi penjelasan atas dasar atau justifikasi Pengelola Katalog untuk membuat Etalase Produk atau menayangkan produk pada Katalog Elektronik.
2. Dapat mencantumkan aturan atau regulasi di K/L/PD yang terkait dengan etalase tersebut.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk (misal: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya)
2. Latar Belakang Usulan Produk
Dapat memilih minimal 1 (satu) dari pilihan Latar Belakang sebagai berikut:
 - a. Amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
 - c. Usulan dari Pelaku Usaha;
 - d. Kebutuhan dari K/L/PD; dan atau
 - e. Hasil Monev PBJ.
3. Nama Instansi Pengelola Katalog Elektronik (misal: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)

C. Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik

Paragraf singkat berisi regulasi yang mengatur proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik yaitu Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Bab II : Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa

A. Tipe Pelaku Usaha

Dapat memilih minimal 1 (satu) dari pilihan sebagai berikut:

1. Produsen;
2. Distributor/ Agen; dan/atau
3. Pedagang Eceran/ Retailer

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha;

1. Menyetujui Syarat & Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik
2. Memiliki Izin Usaha dengan merinci KBLI yang sesuai dengan Etalase Produk
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) & Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
4. Akte Pendirian beserta perubahannya dan Pengesahan dari Kemenkumham (untuk Pelaku Usaha Badan Usaha)
5. Tidak sedang dikenakan Status Daftar Hitam
6. Menyampaikan Struktur Pembentuk Harga (apabila diperlukan)

C. Produk yang ditawarkan pada Etalase Produk

Paragraf singkat berisi penjelasan mengenai Kategori atau Jenis Produk yang boleh ditayangkan pada Etalase Produk yang akan dibuat.

Pencarian KBLI mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang dapat diunduh melalui <https://www.bps.go.id/publication.html>, atau akses melalui oss.go.id

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Bab III : Profil Etalase Produk

BANGGA BERTAH
INDONESIA

A. Kategori Produk dan Sub-Kategori Produk (apabila ada)

Tabel berisi informasi Kategori Produk dari suatu Etalase Produk dan Sub-Kategori (apabila ada) untuk masing-masing Kategori Produk yang dibuat (apabila ada)

B. Atribut Produk

1. Atribut Wajib : Atribut yang melekat pada setiap Etalase Produk
2. Atribut Tambahan : Atribut yang ditetapkan pada Etalase Produk tertentu menyesuaikan dengan karakteristik jenis produk yang akan dicantumkan

C. Kelas Harga Produk

memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) jenis Kelas Harga Produk antara lain:

1. Harga Nasional; Harga produk untuk pembelian se-Indonesia adalah sama (satu harga); atau
2. Harga Provinsi; Harga Produk dapat berbeda pada tingkat provinsi; atau
3. Harga Kabupaten/Kota; Harga Produk dapat berbeda sampai tingkat Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

Memilih 1 (satu) dari pilihan sebagai berikut:

1. Menampilkan Stok Produk; atau
2. Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Kebutuhan Ongkos Kirim;

Memilih 1 (satu) dari pilihan sebagai berikut berdasarkan kebutuhan untuk pengenaan ongkos kirim:

1. Ya (Butuh Ongkos Kirim)
2. Tidak (Tidak Butuh Ongkos Kirim)

F. Duplikasi Pembelian Produk;

1. Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
2. Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Contoh Kategori Produk

Kategori	Sub Kategori
Servis Kendaraan	Servis Sepeda Motor
	Servis Mobil Penumpang
	Servis Mobil Barang
	Servis Mobil Listrik Berbasis Baterai
	Servis Motor Listrik Berbasis Baterai
	Servis Mobil Pemadam Kebakaran
	Servis Ambulans
	Servis Bus
	Servis Bus Listrik
Suku Cadang/ <i>Spareparts</i>	-

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Contoh Atribut Produk

1. Kategori Servis Kendaraan

- a) Nama Produk;
- b) Merek;
- c) No. Produk Penyedia;
- d) Unit Pengukuran;
- e) Jenis Produk;
- f) Kode KBKI;
- g) Nilai TKDN(%);
- h) Nilai BMP (%);
- i) Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j) Masa Berlaku Produk;
- k) Rincian Layanan Servis;
- l) Komponen Biaya;
- m) Lokasi Bengkel; dan
- n) Keterangan Lainnya.

**Atribut
Wajib**

**Atribut
Tambahan**

2. Kategori Suku Cadang/ *Spareparts*

- a) Nama Produk;
- b) Merek;
- c) No. Produk Penyedia;
- d) Unit Pengukuran;
- e) Jenis Produk;
- f) Kode KBKI;
- g) Nilai TKDN(%);
- h) Nilai BMP (%);
- i) Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j) Masa Berlaku Produk;
- k) Komponen Biaya;
- l) Lokasi Bengkel; dan
- m) Keterangan Lainnya.

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP


Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Contoh Kelas Harga

Harga Nasional

Home > Lumier Lengkap LED jalan tanpa Smart System > Lumier Lengkap LED jalan Lingkungan > LED STREET LIGHT



SHINE LED STREET LIGHT
4653102999-APJ-000371148
PT. MUTIARA SAMUDERA PASAI
Katalog Nasional
Alat Penerangan jalan PON

Rp 2.877.000,00


Stok Produk : Hubungi Penyedia

Spesifikasi Lampiran Referensi Ongkos Kirim Diskusi Produk

Nama Produk	LED STREET LIGHT
Masa Berlaku Produk	2023-12-30
Merek	SHINE
No. Produk Penyedia	SH-E101-30 WATT
Unit Pengukuran	unit
Jenis Produk	PON
Kode KBKI	4653102999

Harga Kab/Kota

Home > Material Bangunan Terkirim > Semen > CR 107 - 30 KG



LEMKRA CR 107 - 30 KG
3733001002-QT3-019791192
PT. Guna Bangun Jaya
Katalog Lokal
Bahan Material Kota Medan

Rp 399.600,00

Wilayah Kota Medan
Stok Produk : Hubungi Penyedia

Pilih Lokasi untuk melihat Harga
Kota Medan

Spesifikasi Lampiran Diskusi Produk

Nama Produk	CR 107 - 30 KG
Masa Berlaku Produk	2030-12-31
Merek	Lemkra
No. Produk Penyedia	03002
Unit Pengukuran	Zak
Jenis Produk	PON
Kode KBKI	3733001002

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP


Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Contoh Kelas Harga

Harga Provinsi

Home > Obat > Serum antitetanus (A.T.S) (g) 1500 IU/ml (i.m)



BIOSAT 1,5 SERUM ANTITETANUS (A.T.S) INJ 1500 IU/ML (I.M)

3527902002-000-000945218

PT. BIO FARMA

Katalog Sektoral

Obat

Rp 140.188,00

Wilayah DKI Jakarta

Stok Produk 10722

Pilih Lokasi untuk melihat Harga

Pilih


e

Spesifikasi | Lampiran | Laporan | Diskusi Produk

Nama Produk	Serum antitetanus (A.T.S) (g) 1500 IU/ml (i.m)
Masa Berlaku Produk	2025-02-15
Merek	BIOSAT 1,5
No. Produk Penyedia	05.006
Unit Pengukuran	Ampul

Harga Kab/Kota

Home > Mobil Penumpang > XL7 BETA M/T



SUZUKI XL7 BETA M/T

4011302004-KB2-001907251

PT SUZUKI INDOMOBI SALES

Katalog Nasional

Kendaraan Bermotor

Rp 265.000.000,00

Wilayah Kabupaten Semarang

Stok Produk : 15

Pilih Lokasi untuk melihat Harga

Kabupaten Semarang

Spesifikasi | Lampiran | Diskusi Produk

Nama Produk	XL7 BETA M/T
Masa Berlaku Produk	2023-12-31
Merek	Suzuki
No. Produk Penyedia	XL7415F BETAMT

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Daftar Fitur Duplikasi Pembelian Produk

NO	NAMA BARANG/JASA	MEREK	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Fiber Optik Internasional 2 Mbps	Hypernet	12	Bulan	Rp 2.805.000	Rp 33.660.000
2	Fiber Optik Internasional 2 Mbps	Hypernet	10	Bulan	Rp 2.805.000	Rp 28.050.000
3	Fiber Optik Internasional 2 Mbps	Hypernet	12	Bulan	Rp 2.805.000	Rp 33.660.000
4	Fiber Optik Internasional 2 Mbps	Hypernet	8	Bulan	Rp 2.805.000	Rp 22.440.000
5	Fiber Optik Internasional 2 Mbps	Hypernet	12	Bulan	Rp 2.805.000	Rp 33.660.000
GRAND TOTAL						Rp 151.470.000

► Dengan adanya fitur duplikasi, dalam satu proses pemesanan, produk yang sama bisa di duplikasi (baik untuk e—purchasing Bersama hasil Konsolidasi)

Tanpa Daftar Fitur Duplikasi Pembelian Produk

NO	NAMA BARANG/JASA	MEREK	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Fiber Optik Internasional 2 Mbps	Hypernet	54	Bulan	Rp 2.805.000	Rp 151.470.000
GRAND TOTAL						Rp 151.470.000

► Tanpa Fitur Duplikasi, kuantitas harus digabung

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

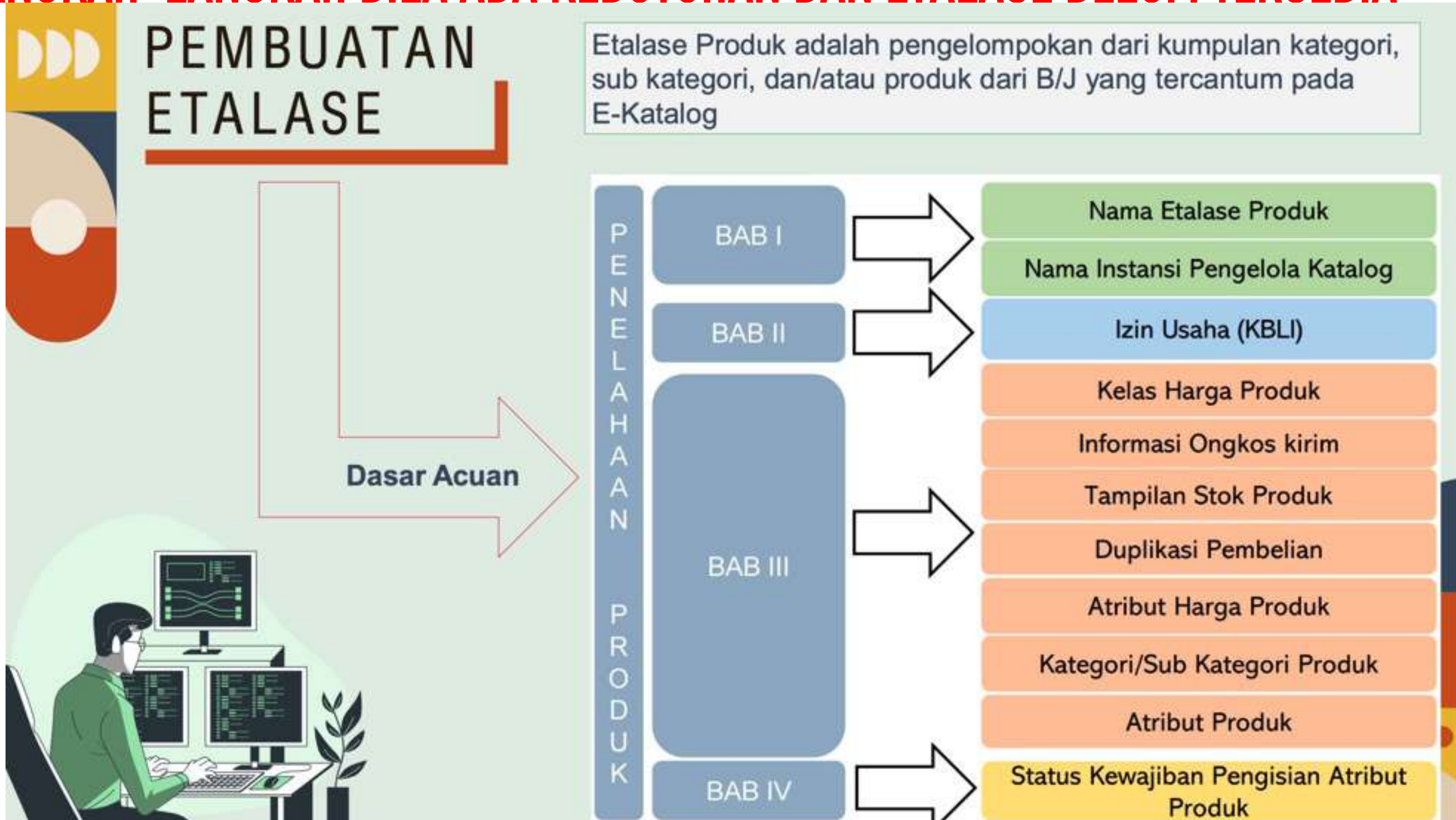
Bab IV : Petunjuk Pengisian Atribut Produk

No	Atribut Produk	Status Kewajiban Pengisian Atribut Produk	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Masa berlaku produk	Wajib Diisi	Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik <i>(Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)</i>
Dst(Atribut tambahan 1)
(Atribut tambahan 2) dst

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA



Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA



Penetapan Penelaahan Produk

LKPP



Pejabat Pimpinan Tinggi yang melaksanakan fungsi Pengembangan Sistem Katalog

NASIONAL

SEKTORAL

LOKAL

Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah



Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin atau membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Penetapan Penelaahan Produk oleh Pejabat Berwenang dalam bentuk Surat Keputusan atau Dokumen Lainnya sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku di masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Think Different, Be Different

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

Contoh Dokumen Penelahaan
Library Dokumen Penelahaan Produk
beserta Dokumen Pengumuman
pada <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh>



Unduh

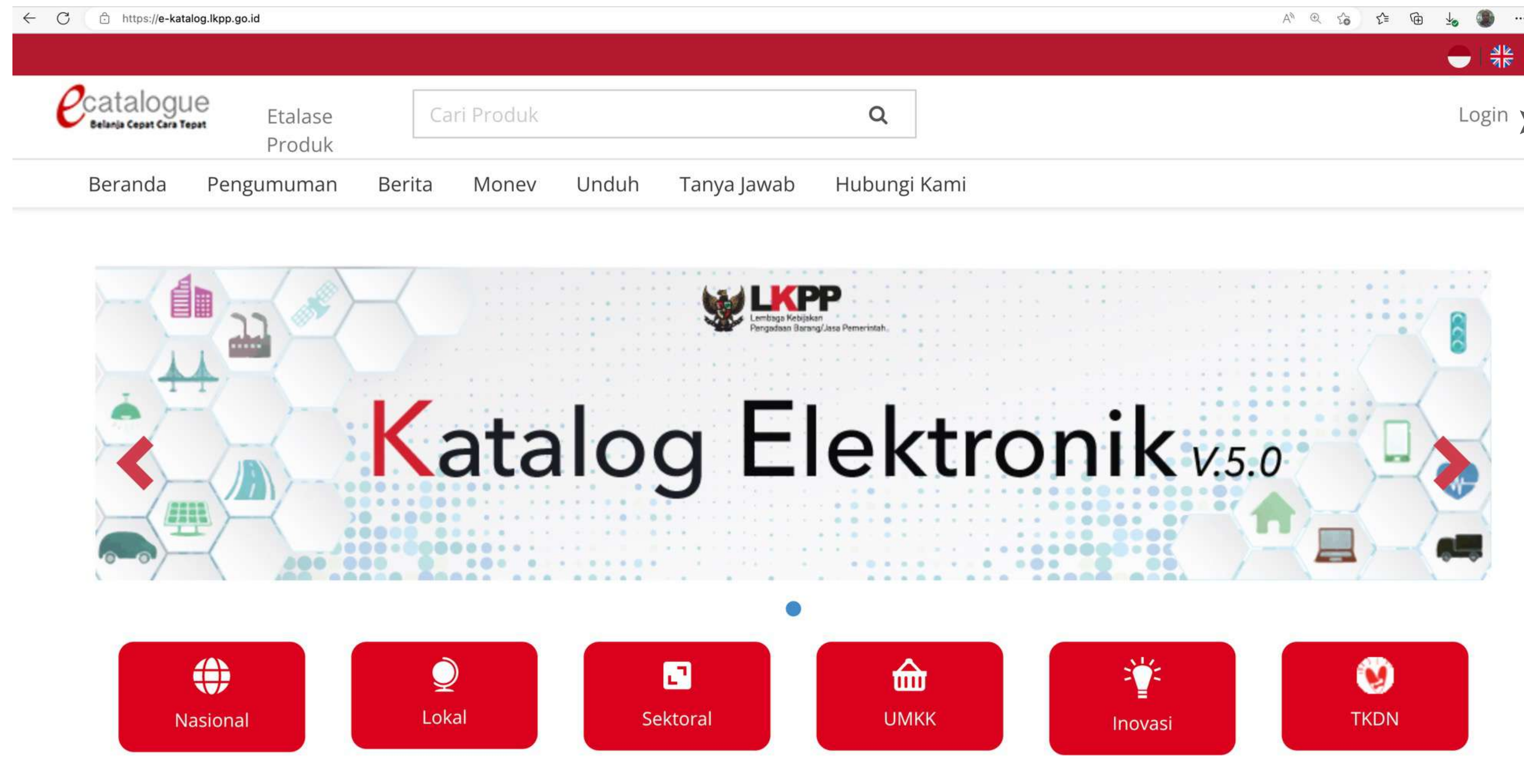
Petunjuk Penggunaan	Informasi	Petunjuk Penggunaan
Petunjuk Penggunaan Aplikasi - Pencantuman dan Penambahan Produk (Penyedia)	Library Dokumen Penelahaan Produk beserta Pengumuman	Petunjuk Penggunaan Aplikasi - ePurchasing (1 November 2021) untuk Distributor
Diunggah pada 27 Jul 2022	Diunggah pada 26 May 2022	Diunggah pada 22 Apr 2022
Unduh 2.08 MB	Unduh 78.43 MB	Unduh 1.31 MB

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

SETELAH DOKUMEN TERSEDIA, LOGIN AKUN PENGELOLA KATALOG LOKAL



Login ➔ Klik disini

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

SETELAH DOKUMEN TERSEDIA, LOGIN AKUN PENGELOLA KATALOG LOKAL

← ↻ 🔒 https://e-katalog.lkpp.go.id/user/login



Login Penyedia Login Non Penyedia

- Isi user ID
- Isi password
- Klik Login

Belum punya akun sebagai Penyedia Katalog

Elektronik? [Daftar disini](#)

[Kembali ke Beranda](#)

Pak C / Mr. C

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

SETELAH DOKUMEN TERSEDIA, LOGIN AKUN PENGELOLA KATALOG LOKAL

The screenshot shows the homepage of the e-catalogue system. At the top left is the logo 'ecatalogue' with the tagline 'Belanja Cepat Cara Tepat'. A search bar labeled 'Cari Produk' is located at the top center. On the right, the user name 'Christian ...' is displayed. The main navigation menu includes 'Beranda', 'Pengumuman', 'Manajemen Etalase Produk', 'Pra Katalog', 'Produk', and 'Permohonan Pembaruan'. A dropdown menu is open under 'Manajemen Etalase Produk', showing 'Etalase Produk' and 'Merek'. Red arrows point to 'Manajemen Etalase Produk' and 'Etalase Produk' with the text 'Klik Menu "Manajemen Etalase Produk"' and 'Pilih sub-menu "Etalase Produk"' respectively. The main banner features the LKPP logo and the text 'Katalog Elektronik v.5.0'. Below the banner is a row of six red buttons: 'Nasional', 'Lokal', 'Sektoral', 'UMKK', 'Inovasi', and 'TKDN'.

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

SETELAH DOKUMEN TERSEDIA, LOGIN AKUN PENGELOLA KATALOG LOKAL

The screenshot shows the admin interface of the e-catalogue system. The top navigation bar includes the logo 'e-catalogue' and the text 'Etalase Produk'. A search bar is present with the placeholder text 'Cari Produk'. The user is logged in as 'Christian ...'. The main content area features a sidebar on the left with various filters and a main table of products. A red arrow points to a blue button labeled '+ Tambah Etalase Produk'.

+ Tambah Etalase Produk ➤ **Klik Button "Tambah Etalase Produk"**

No.	Nama Etalase Produk	Kode Etalase Produk	Kategori	Kelas Harga	Terkunci	Aktif	Status
1.	Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat	ZW&	Lokal	Kabupaten/Kota	Tidak	Ya	publish

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

SETELAH DOKUMEN TERSEDIA, LOGIN AKUN PENGELOLA KATALOG LOKAL

The screenshot shows the 'Tambah Etalase Produk' form in the e-catalogue system. The form includes the following fields and options:

- Bidang:** Pilih (dropdown menu)
- Seluruh KBLI:** Tidak (dropdown menu)
- Nama Etalase Produk*:** (text input field)
- Kode Etalase Produk*:** (text input field)
- Kelas Harga*:** Nasional (dropdown menu)
- Default Jenis Produk*:** PDN (dropdown menu)
- Jenis Produk Dapat di Override*:** Ya. Penyedia dapat melakukan override pilihan jenis produk pada form produk. Tidak. Jenis produk otomatis ditentukan berdasarkan Default Jenis Produk pada form etalase produk ini.
- Stok Produk*:** Informasi Stok Menghubungi Penyedia Normal (Menggunakan Stok)
- Margin Harga (%)*:** 0.00 (text input field)

Minimal % (persentase) keuntungan dari selisih harga jual (Harga Retail - Harga Pemerintah). Contoh: 2.5%, maka hanya produk yang minimal margin harganya 2.5% yang akan ditampilkan pada katalog. Isikan 0.00% apabila tidak membutuhkan adanya margin harga.

- Admin Mengisi Formulir sesuai dengan dokumen hasil Telaahan/Hasil Tender dan/atau Negosiasi Katalog

Pak C / Mr. C

LANGKAH-LANGKAH BILA ADA KEBUTUHAN DAN ETALASE BELUM TERSEDIA

SETELAH DOKUMEN TERSEDIA, LOGIN AKUN PENGELOLA KATALOG LOKAL

The screenshot shows the 'e-catalogue' admin interface. The browser address bar displays 'https://e-katalog.lkpp.go.id/admin/komoditas/create'. The page title is 'Etalase Produk'. The navigation menu includes: Beranda, Pengumuman, Manajemen Etalase Produk, Pra Katalog, Produk, Permohonan Pembaruan, Manajemen Pengguna, Profil, Berita, Monev, Unduh, Tanya Jawab, and Syarat dan Ketentuan. The main content area contains a form with the following fields and options:

- Akses External URL* Ya Tidak
- Butuh Negosiasi Harga* Ya Tidak
- Butuh Ongkos Kirim* Ya Tidak
- Pra Katalog* Negosiasi
 Tender Tanpa Negosiasi
 Tender Dengan Negosiasi
- Butuh Persetujuan Produk* Ya Tidak
- Butuh Persetujuan Distributor* Ya Tidak
- Butuh Persetujuan Perubahan Stok* Ya Tidak
- Butuh Persetujuan Perubahan Harga* Ya Tidak
- Butuh Persetujuan Perubahan Produk* Ya Tidak
- Penyedia Input Merek* Ya Tidak
- Apakah Online Shop* Ya Tidak
- Integrasi NIE/Kemenkes* Ya Tidak
- Gunakan Sistem Iklan* Ya Tidak
- Duplikat Pembelian Produk* Ya Tidak

A blue 'Simpan' button is located at the bottom right of the form area.

➤ Admin Mengisi Formulir sesuai dengan dokumen hasil Telaahan/Hasil Tender dan/atau Negosiasi Katalog

➤ Setelah Selesai Klik Tombol "Simpan"

Pak C / Mr. C

KATALOG SIAP TAYANG?????

PEMBUATAN PENGUMUMAN

Kepala UKPBJ Membuat Pengumuman Etalase Produk
Kemudian diupload di Katalog Elektronik melalui alamat e-katalog.lkpp.go.id

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK BETON READY MIX

Bersama ini kami mengundang para Pelaku Usaha Produsen Beton Ready Mix untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik. Adapun informasi produk dan persyaratan penyedia adalah sebagai berikut:

A. Informasi Produk

Kategori	
Beton Ready Mix Terkirim	Beton Ready Mix
	Beton Ready Mix
	Beton Ready Mix
	Beton Ready Mix
	Beton Ready Mix
	Beton Ready Mix
	Beton Ready Mix
	Beton Ready Mix
	Beton Ready Mix
	Beton Ready Mix

B. Syarat Penyedia

Pelaku Usaha yang diundang akan mengikuti persyaratan sebagai berikut:

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Beton Ready Mix)
2. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

The screenshot shows the e-katalog.lkpp.go.id website interface. The main content area displays a list of announcements under the heading 'Pengelola Katalog'. The announcements are as follows:

Local	Local	Local	Local
Pengumuman Pendaftaran Penyedia Etalase AAA Latiha...	Pendaftaran Etalase Bahan Pokok Kategori Buah Buah...	Pengumuman Pendaftaran Penyedia Etalase Latihan	Pendaftaran Penyedia Etalase Produk Pekerjaan Pres...
Etalase Produk: AAA Latihan	Etalase Produk: Bahan Pokok Provisi DKI Jakarta (LPSI)	Etalase Produk: (Latihan) DKI Jakarta	Etalase Produk: Pekerjaan Preservasi Jalan Bidang Bina Marga
Tanggal Mulai: 23 September 2022	Tanggal Mulai: 13 September 2022	Tanggal Mulai: 23 September 2022	Tanggal Mulai: 22 September 2022
Tanggal Akhir:	Tanggal Akhir:	Tanggal Akhir:	Tanggal Akhir: 22 September 2023
Detail	Detail	Detail	Detail

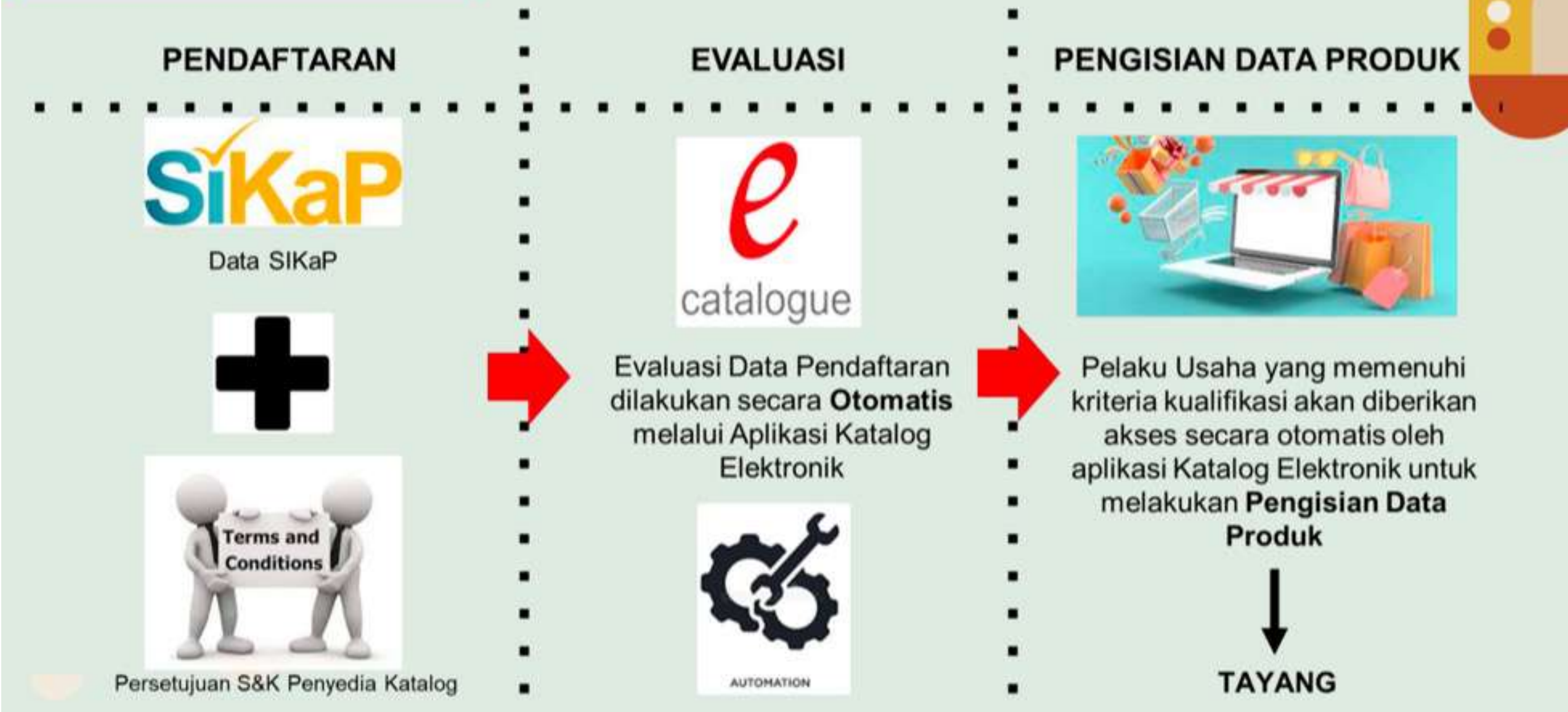
- ▶ Bila merupakan hasil tender dan/atau negosiasi katalog, maka Penyedia yang tayang adalah Penyedia Pemenang saja;
- ▶ Pastikan harga yang diinput sesuai Kontrak Payung (aktifkan filter “butuh persetujuan harga”)
- ▶ Selain itu, Penyedia Bebas menginput

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

KATALOG SIAP TAYANG?????

PENDAFTARAN PENYEDIA



- Bila merupakan hasil tender dan/atau negosiasi katalog, maka Penyedia yang tayang adalah Penyedia Pemenang saja;
- Pastikan harga yang diinput sesuai Kontrak Payung (aktifkan filter “butuh persetujuan harga”)
- Selain itu, Penyedia Bebas menginput

Slide/Modul Bahan Ajar LKPP

Pak C / Mr. C

KATALOG PENGADAAN PEMERINTAH



- 01 Mengetahui Serba Serbi Katalog Elektronik Pengadaan Pemerintah
- 02 Proses Penayangan Produk dalam Katalog Elektronik
- 03 Pelaksanaan Pengadaan dengan Metode Pemilihan “E-Purchasing” menggunakan Katalog Elektronik

PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

PEMBUATAN PAKET E-PURCHASING



Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

NEGOSIASI HARGA

Negosiasi Harga dilakukan dengan memperhatikan **Referensi Harga** yang sudah dikumpulkan



REFERENSI HARGA

JIKA DIPERLUKAN

Meminta kepada Penyedia untuk memberikan **Bukti Transaksi Terakhir** atas produk yang di negosiasi

Transaksi Terakhir

Meminta **Struktur Pembentuk Harga** dari Produk yang dinegosiasi

Struktur Harga

Melakukan Pengecekan **Riwayat Harga Transaksi Penyedia** pada Aplikasi Katalog Elektronik (Apabila sudah tersedia)

Riwayat Harga

Mempertimbangkan adanya **Layanan Teknis Pendukung**

Layanan Teknis Pendukung

PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

RIWAYAT HARGA TRANSAKSI PENYEDIA

[Kembali](#) [Kirim Negosiasi](#)

Negosiasi Paket PPK-P2108-420

Komoditas	Peralatan Perkantoran
No. Paket	PPK-P2108-420
Nama Paket	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Pemesan Setuju	Belanja Setuju
Penyedia Setuju	TAMBAH DIBAYAR 27.08.2021

Jumlah Produk yang Dipesan	1
Total Harga Produk	15,450,000.00
Kurs	IDR

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Tanggal Pengiriman Produk	Harga Terbaik	Catatan Tambahan	Total Harga
			Harga Satuan	Perkiraan Ongkos Kirim					
56101700-PPK-004762422 Meja Rapat Besar 320*120 cm - Flexmo Series	1	IDR	15,450,000.00	0.00		27-08-2021	15,000,000.00		15,450,000.00

Harga Terbaik yang pernah dilakukan E-Purchasing

Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

RIWAYAT HARGA TRANSAKSI PENYEDIA

Menampilkan 25 data

Pencarian:

No.	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan	Satuan Kerja	Instansi
1.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	2	Rp. 15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK MASYARAKAT DAN DESA	Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir
2.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	2	Rp. 14.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemerintah Daerah Kabupaten Balaang Mongondow Selatan
3.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	2	Rp. 14.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pemerintah Daerah Kabupaten Balaang Mongondow Selatan
4.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	2	Rp. 14.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	Pemerintah Daerah Kota Bekasi
5.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	2	Rp. 15.000.000	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
6.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	2	Rp. 13.000.000	DINAS KESEHATAN	Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
7.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	1	Rp. 15.000.000	DINAS KESEHATAN	Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
8.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	1	Rp. 15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
9.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	4	Rp. 13.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Pemerintah Daerah Kota Serang
10.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	1	Rp. 15.484.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Pemerintah Daerah Kota Serang
11.	Meja Rapat Besar 320 *120 cm - Flexmo Series	3	Rp. 13.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK MASYARAKAT DAN DESA	Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir

Menampilkan Halaman 1 dari 1

Navigation: < 1 >

Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

NEGOSIASI LAYANAN TEKNIS PENDUKUNG



Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

KESEPAKATAN NEGOSIASI HARGA & LAYANAN TEKNIS PENDUKUNG

Kesepakatan Harga Satuan pada saat
Negosiasi Harga dan Negosiasi Layanan
Teknis Pendukung antara PPK/PP dengan
Penyedia **Tidak Boleh melebihi Harga Satuan
tayang** yang tercantum dalam Aplikasi
Katalog Elektronik



Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN NEGOSIASI E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Kerja yang diperlukan dalam NEGOSIASI:

- ▶ Dapat melakukan persiapan dan pelaksanaan NEGOSIASI dengan keluaran akhir Berita Acara Hasil Negosiasi
- ▶ Paham pentingnya negosiasi dan tahapannya
- ▶ Paham bagaimana persiapan dan pelaksanaan negosiasi yang professional
- ▶ Paham bahwa persiapan Negosiasi yang baik akan meningkatkan kesuksesan
- ▶ Paham bahwa tujuan dan target negosiasi harus realistis dan dapat dicapai (achievable)
- ▶ Paham bahwa dalam Negosiasi ada etika yang diperlukan unntuk keberhasilan dan memiliki sensitifitas pada penyebab negosiasi gagal dan cara menindaklanjutinya
- ▶ Paham bahwa dalam Negosiasi terdapat proses mendengarkan dan Teknik bertanya yang baik
- ▶ Paham bagaimana melakukan proses pengelolaan dokumentasi hasil pelaksanaan Negosiasi

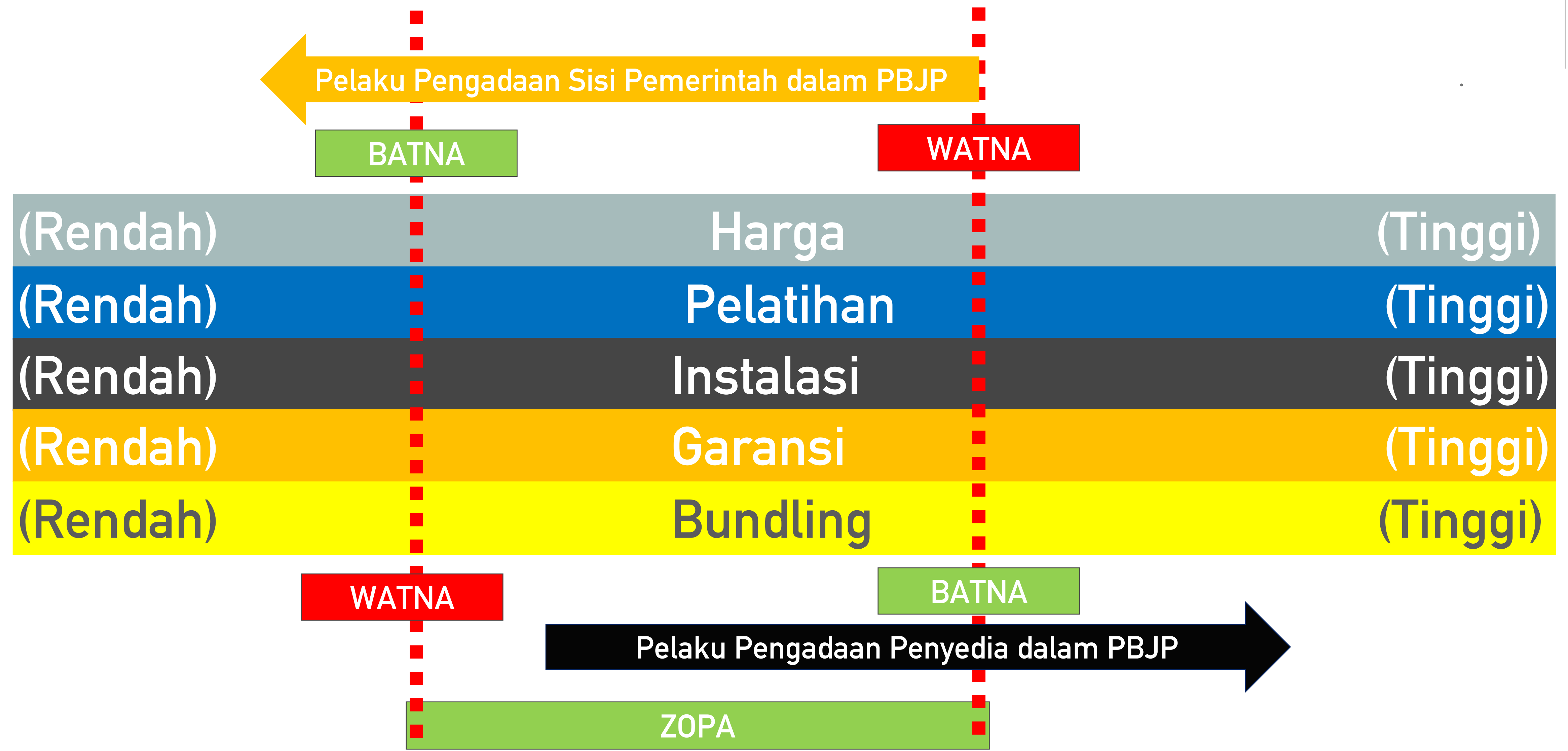
Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN NEGOSIASI E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

- ▶ Zone of Possible Agreement (ZOPA) : Area kesepakatan yang realistis dan dapat dicapai
- ▶ Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) : Titik dimana kesepakatan terbaik yang dapat diperoleh dari proses Negosiasi
- ▶ Worst Alternative to a Negotiated Agreement (WATNA) : Titik dimana kesepakatan dengan kondisi paling minimal (terburuk) yang dapat diperoleh dari proses Negosiasi namun masih dapat ditolerir

Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN NEGOSIASI E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK



Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN NEGOSIASI E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK



- ▶ Zone of Possible Agreement (ZOPA) : Area kesepakatan yang realistis dan dapat dicapai
- ▶ Best Alternative to a Negotiated Agreement (BATNA) : Titik dimana kesepakatan terbaik yang dapat diperoleh dari proses Negosiasi
- ▶ Worst Alternative to a Negotiated Agreement (WATNA) : Titik dimana kesepakatan dengan kondisi paling minimal (terburuk) yang dapat diperoleh dari proses Negosiasi namun masih dapat ditolerir

Pak C / Mr. C

PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

TANDA TANGAN SURAT PESANAN

KESEPAKATAN :

NEGOSIASI HARGA

NEGOSIASI LAYANAN TEKNIS
PENDUKUNG (APABILA ADA)

DICATATKAN :

APLIKASI KATALOG ELEKTRONIK

RANCANGAN SURAT PESANAN



UNGGAH SURAT
PESANAN PADA
APLIKASI KATALOG
ELEKTRONIK

TANDA TANGAN
SURAT PESANAN

FINALISASI
RANCANGAN SURAT
PESANAN

PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

UPDATE PROGRES PELAKSAAN PEKERJAAN PADA APLIKASI KATALOG ELEKTRONIK



- Bila tidak di update? Transaksi tidak dianggap/tercatat di Sistem Monev
- Rating Penyedia akan tidak terisi, berdampak pada Penyedia berkinerja buruk tetap tayang sehingga pasar tidak terbentuk dengan semestinya



Pak C / Mr. C

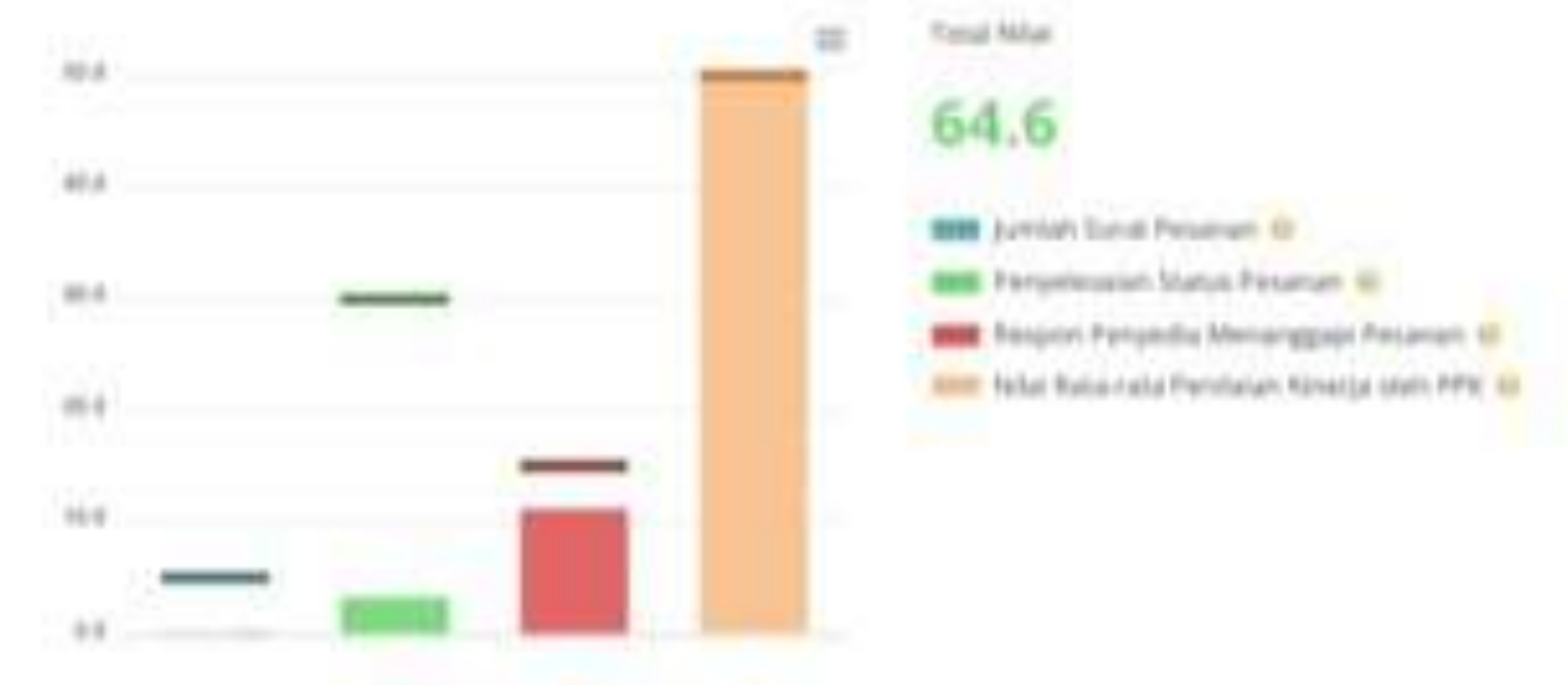
PELAKSANAAN E-PURCHASING MELALUI KATALOG ELEKTRONIK

- ▶ Bila tidak di update? Transaksi tidak dianggap/tercatat di Sistem Monev
- ▶ Rating Penyedia akan tidak terisi, berdampak pada Penyedia berkinerja buruk tetap tayang sehingga pasar tidak terbentuk dengan semestinya

TAMPILAN HASIL RATING PENYEDIA

- Penilaian Kinerja adalah penilaian penyedia berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang tata cara pengisian katalog elektronik pada procurement barang/jasa pada katalog elektronik nomor 11 tahun 2022
- Penilaian Kinerja oleh PPK adalah hasil akumulasi dari penilaian yang diberikan oleh PPK untuk setiap paket yang sudah selesai

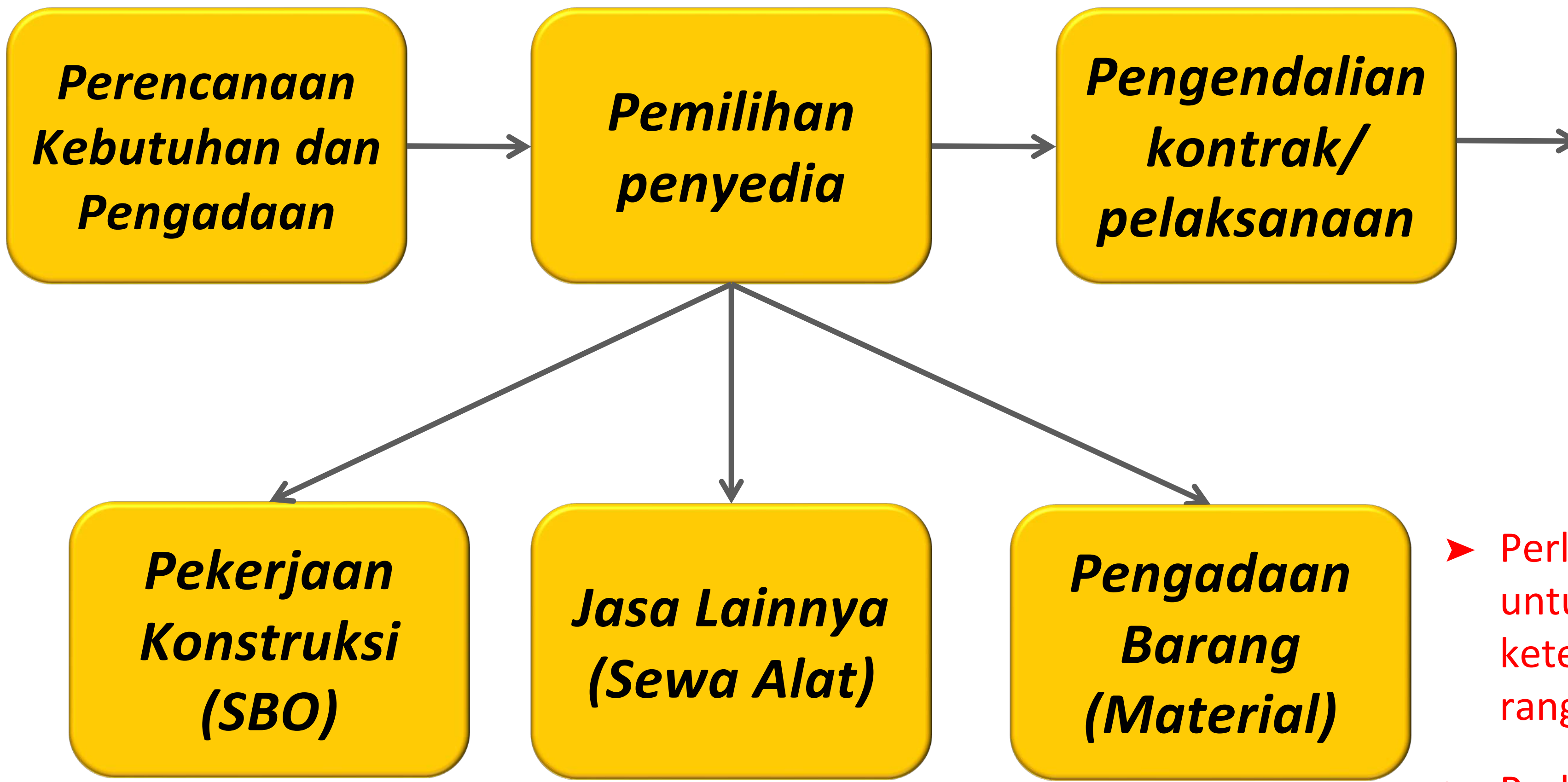
Penilaian Kinerja



Penilaian Kinerja oleh PPK



Pak C / Mr. C



- Perlu desain kontrak yang baik, terutama untuk mendesain "kompensasi" akibat keterlambatan waktu satu vendor dengan rangkaian kerja vendor lainnya
- Perlu negosiasi yang tajam berkaitan dengan "management fee/facility fee"

Pak C / Mr. C

KESIMPULAN

MANFAAT KATALOG ELEKTRONIK DALAM PBJP :



PBJP MENJADI PENDUKUNG PROSES PELAYANAN PUBLIK

- Meningkatkan Pelayanan Publik dengan percepatan
- Menyederhanakan proses dengan reduksi aktivitas waktu dan tenaga
- Meningkatkan kualitas Pengadaan dengan penurunan kuantitas paket

Pak C / Mr. C

KESIMPULAN : DALAM PROSES PENGELOLAAN KATALOG MAKA :

Perlu dilakukan :

Perencanaan dan Koordinasi yang lebih menyeluruh

Dilakukan di
tahap
Perencanaan
n
Pengadaan

Identifikasi
kebutuhan
dilakukan
secara
menyeluruh

integrasi
kan
dalam
RUP

Komunikasi, komitmen, dan Kepemimpinan
PA/KPA/PPK/PP/UKPBJ



KESIMPULAN : DALAM PROSES PENGELOLAAN KATALOG MAKA :



Penyelarasan dengan Kebijakan Anggaran

Menghasilkan
Strategi
Pengadaan
Barang/Jasa
Yang Selaras
Bagi seluruh
Unit
Organisasi

Kebijakan
Anggaran
dari Unit
Organisasi

Penyelarasan
Waktu, Jumlah
Barang/Jasa,
dan Besaran
Anggaran

Kemampuan
merumuskan
pelaksanaan
Katalog

KESIMPULAN : DALAM PROSES PENGELOLAAN KATALOG MAKA :



Sumber Daya Manusia PBJ



Sumber Daya Manusia PBJ

Profesionalisme
Pelaku
Pengadaan



Pengembangan
Kompetensi SDM
PBJ

Ketersediaan
SDM
Dari sisi
Kualitas

Ketersediaan
SDM
Dari sisi
Kuantitas

Standar Kompetensi Kerja PBJ



Deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang di tempat kerja dalam PBJ

APA yg dikerjakan??



Deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh seorang pelaku PBJ sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerjanya.

KINERJA yang diharapkan??



Deskripsi tentang bagaimana caranya mengetahui/mengukur bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang telah atau belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan

Penukuran KINERJA??

KESIMPULAN : DALAM PROSES PENGELOLAAN KATALOG MAKA :



Infrastruktur Penunjang

Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung

“SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemda di seluruh Indonesia”



Ekosistem
Dan
Sistem
Pengadaan
Secara
Elektronik

Optimasi
Ketersediaan
Infrastruktur

PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia

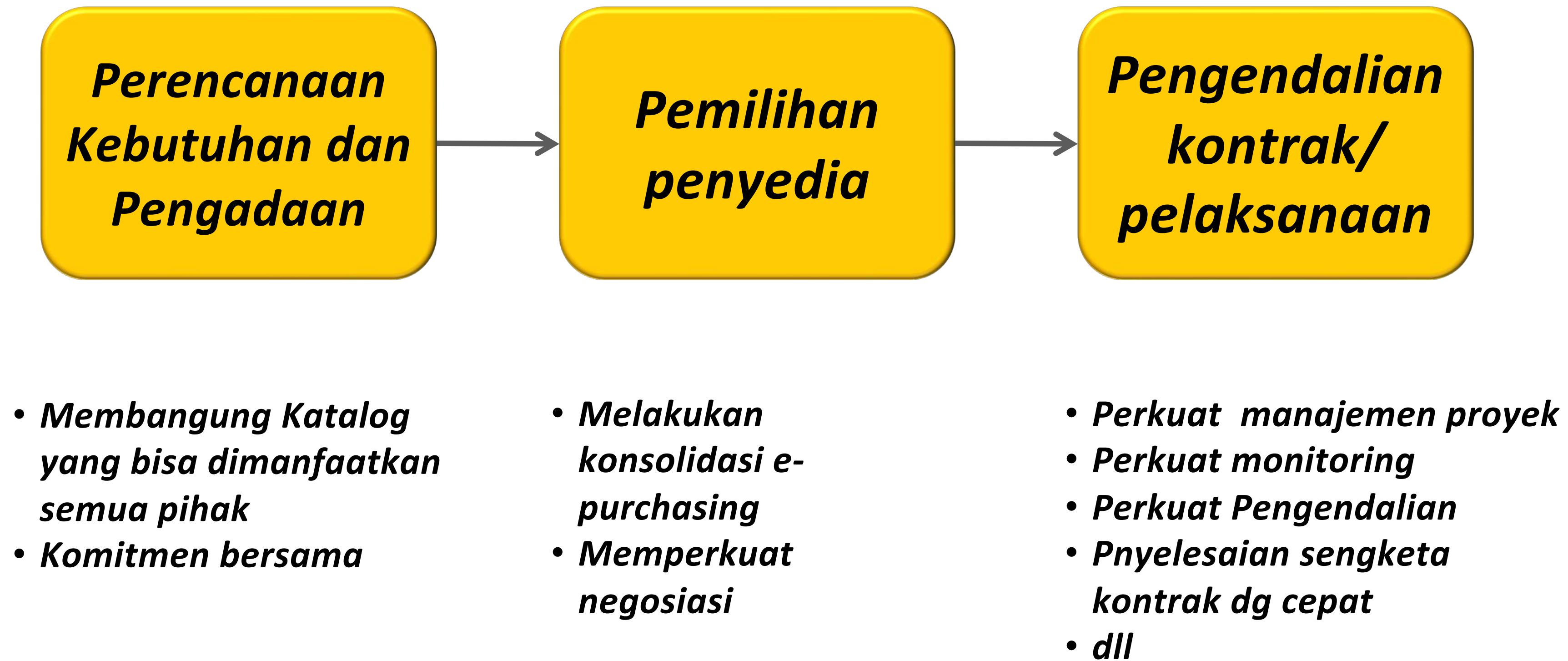


- ▶ Pemaketan berdasarkan komoditas barang/jasa sejenis
- ▶ Pemaketan berdasarkan kebutuhan rutin dan kebutuhan tidak rutin
- ▶ Pemaketan berdasarkan lokasi pelaku usaha atau lokasi kebutuhan; dan
- ▶ Pemaketan berdasarkan kepentingan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil

Pak C / Mr. C

Kesimpulan :

Strategi Belanja e-Purchasing Katalog



SEKIAN

Terima Kasih Semoga bermanfaat



Referensi :

1. Peraturan Perundangan Terkait
2. Slide/Modul Bahan Ajar LKPP
3. Excellence in Public Sector Procurement – How to control costs and add value (Stuart Emmett & Paul Wright, 2011 – ISBN 1-903-499-66-6)